

e-news letter

MEI IV 2020

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANSIAL

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Momentum Idul Fitri 1441 H

SAATNYA KOKOHKAN PERSATUAN & KESATUAN

New Normal dengan kebijakan Abnormal

Seringkali berpikir apa yang kita pikir pasti sudah terpikirkan oleh para pemegang kebijakan. Namun rumitnya mengapa mereka tidak bertindak seperti apa yang kita pikirkan, nampak bertolak belakang dan tidak sesuai harapan. Kemudian muncul pertanyaan selanjutnya, jika memang harapan kita salah mengapa kasus Covid tidak kunjung turun dan wabah masih mengintai tajam

Sulit rasanya masuk ke situasi baru yang berbeda dengan sebelumnya (new normal), dikala petang Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyampaikan data jumlah kasus Covid-19 di Indonesia hingga Kamis (26/5/2020) masih terus bertambah menjadi 23.851 kasus, terjadi penambahan sebanyak 686 kasus. Sementara itu, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 6.057 orang dan diantaranya 1.473 pasien meninggal dunia. Nampak bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi pada hari selasa (25/5) kala meninjau Stasiun Modra Raya Terpadu (MRT) Bundaran HI,

Jakarta Pusat, dalam rangka persiapan menuju new normal yang dicanangkan pemerintah di tengah pandemi Covid-19.

Seringkali berpikir apa yang kita pikir pasti sudah terpikirkan oleh para pemegang kebijakan. Namun rumitnya mengapa mereka tidak bertindak seperti apa yang kita pikirkan, nampak bertolak belakang dan tidak sesuai harapan. Kemudian muncul pertanyaan selanjutnya, jika memang harapan kita salah mengapa kasus Covid tidak kunjung turun dan wabah masih mengintai tajam. Apakah benar new normal model ini yang kita akan jalani di hari-hari kedepan. Inikah yang dimaksud beraman dan hidup berdampingan

dengan covid 19. Jadi terkesan abnormal, dimana suatu kondisi dimana kondisi dipandang aneh atau berbeda dari biasanya.

Ada tiga dimensi etika publik; pertama tujuan yang berkualitas dan relevan. Kedua modalitas yang akuntabilitas dan dilakukan dengan transparan. Ketiga tindakan yang didasarkan pada integritas public. Tapi apa yang berkembang nampak jauh dari nilai-nilai tersebut, jauh lebih dominan motif ketergesaan. Latah merespon himbuan WHO namun alpa tidak serius melewati fase yang dianjurkan oleh WHO terhadap banyak negara yang kini akan memasuki gerbang "new normal".

Kebijakan new normal sebagaimana yang disampaikan WHO jangan ditangkap secara separuh-separuh oleh Pemerintah, karena WHO juga memberikan penekanan bahwa new normal itu hanya berlaku bagi negara yang sudah berhasil melawan Covid-19, seperti China, Vietnam, Jerman, Taiwan, dan negara lainnya. Sementara kita masih jauh dari kata berhasil, kenapa justru mau segera menerapkan new normal. Lalu darimana kebijakan ini hadir?

Pentingnya menjadikan ilmu pengetahuan atau scientist sebagai panglima dalam membuat ukuran kebijakan. Negara



yang berhasil menurunkan kurva penyebaran Covid-19 itu sangat mengandalkan data dan masukan dari scientist. Rumitnya berulang kali sejumlah kajian dari ikatan dokter dan keilmuan datang silih berganti terkait Covid 19 faktanya diabaikan begitu saja.

Kita tidak pernah benar-benar mengerti apa tujuan dan grand design penanganan Covid 19 Pemerintah, kita ada di fase mana saat ini dan kapan kita akan melangkah ke fase selanjutnya. Karena yang terjadi Pemerintah lebih serius melakukan lompat langsung ke kesim-

pulan (*jump to conclusion*) mendorong New Normal berbasis tanggal dibandingkan dengan berdasarkan indikator medis.

Selanjutnya, bagaimana transparansi dan akuntabilitas data yang berkembang saat ini. Sudah berapa banyak tes PCR dan Swab yang sudah dilakukan, bagaimana alokasi anggaran dan refocusing dijalankan, entahlah gelap tak bertuan. Terakhir, antara pejabat terjadi miskordinasi dan miskomunikasi yang menyebabkan public ragu dan distrust.

Benar - Benar New Normal



Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI
Mengucapkan

Selamat
Idul Fitri
Hari Kemerangan 1 Syawal 1441 H

Di moment yang fitri ini
kita kokohkan persatuan dan
kesatuan Bangsa.

Mohon Maaf Lahir Batin
Taqabbalallahu minna
wa Minkum

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Wacana Pelonggaran PSBB

Sukamta: Apa Tanda-tanda Pemerintah Menyerah Atasi Covid-19 ?

Ini kan akhirnya terkesan pemerintah buat kebijakan PSBB, daerah berusaha laksanakan dengan sungguh-sungguh tetapi malah pemerintah sendiri yang mengingkari dengan wacana-wacana pelonggaran

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (18/05) — Wacana pelonggaran PSBB juga menyesuaikan hidup berdampingan dengan virus corona sebagaimana dinyatakan Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan, termasuk pada Jumat (15/05/2020) di Istana Negara.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta, pelonggaran PSBB merupakan sesuatu yang tidak ada urgensinya disampaikan, karena sejak awal rakyat Indonesia sudah dibiarkan untuk hidup berdampingan dengan virus corona dengan berbagai wacana pemerintah yang tidak menentu arahnya.

"Bagaimana masyarakat akan disiplin dengan kebijakan pemerintah, jika wacana yang muncul malah membingungkan? tanya Sukamta.

"Saya kutip pernyataan Pak Presiden hari ini (18/05/2020) melalui siaran akun YouTube Sekretariat Presiden. Saya tegaskan belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Karena muncul, keliru di masyarakat bahwa pemerintah mulai melonggarkan PSBB. 'Belum ada kebijakan pelonggaran.'" tiru Sukamta.

Pernyataan Pak Presiden tersebut, kata Sukamta, seakan

menyalahkan masyarakat yang dianggap keliru pahami wacana-wacana pemerintah. Mestinya yang distop adalah wacana-wacana pemerintah, termasuk wacana presiden di beberapa kesempatan yang kemudian menjadi bahan olok-olok di media sosial.

"Kan kasihan pak Presiden, pernyataan yang beliau sampaikan akhirnya dianggap sebagai lelucon di kala pandemi. Jadi jangan salahkan masyarakat jika wacana-wacana pelonggaran ini dianggap sebagai tanda Pemerintah menyerah dalam menangani Covid-19," pungkasnya.

Menurut Sukamta mestinya jika kebijakan yang dibuat pemerintah merupakan hasil kajian yang mendalam, pemerintah mestinya secara sungguh-sungguh melaksanakannya dan kemudian dievaluasi secara berkala.

"Ini kan akhirnya terkesan pemerintah buat kebijakan PSBB, daerah berusaha



laksanakan dengan sungguh-sungguh tetapi malah pemerintah sendiri yang mengingkari dengan wacana-wacana pelonggaran," tuturnya.

Perlu diingat, lanjut Sukamta, pada 1 April 2020, Presiden sampaikan mengapa kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dipilih, bukan karantina wilayah karena alasan supaya ekonomi masyarakat bisa berjalan, juga dianggap PSBB ini paling sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia

"Ternyata setelah PSBB berjalan di beberapa daerah, banyak kegiatan ekonomi masyarakat yang terganggu. Bahkan di daerah yang tidak diberlakukan PSBB pun ekonomi terganggu," tandasnya.

Ini, kata Sukamta,

menunjukkan kebijakan PSBB yang ditempuh pemerintah masih sisakan 2 masalah besar, pertama tidak mampu kendalikan penyebaran Covid-19 karena hingga hari ini data penambahan positif Covid-19 belum menunjukkan kurva landai, kedua ternyata juga tidak mampu selamatkan ekonomi masyarakat sebagaimana alasan ini digunakan untuk tetapkan kebijakan PSBB.

"Saya kira ini menunjukkan pemerintah tidak tahu mana yang prioritas untuk ditangani, pinggirnya semua bisa diatasi tetapi malah nggak dapat duaduanya," imbuhnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

HNW Dorong Kemenag Berkomitmen Terkait Relaksasi Masjid atau Rumah Ibadah!

Jangan sampai Umat menyaksikan kebijakan relaksasi di berbagai kegiatan dan tempat, tapi Umat tetap dilarang beribadah ke Masjid, karena tentu hal ini akan menimbulkan kekusaran dan rasa ketidakadilan.

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (17/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengkritisi sikap Kementerian Agama yang ambigu untuk melaksanakan keputusan Raker Kemenag dengan Komisi VIII DPR RI soal relaksasi Masjid atau tempat ibadah.

Hidayat yang juga Wakil Ketua MPR RI ini mengingatkan bahwa dalam Rapat Kerja, Kemenag sudah menyepakati untuk mempertimbangkan kebijakan relaksasi pembatasan ibadah di tempat ibadah, khususnya di daerah yang tidak termasuk zona merah.

Sementara kalau untuk yang berada di zona merah, disepakati juga untuk tetap ketat dan sepenuhnya mengikuti aturan penanganan Covid-19.

"Pada saat Raker dengan Kemenag saya memang

menyampaikan aspirasi dari banyak pihak, agar Umat tak resah dan bisa khusyu' Ibadah, penting ada keadilan untuk Umat. Kalau Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan relaksasi terkait PSBB, bahkan ketentuan transportasi dan mudik, bahkan di bandara Soetta sampai berdesakan dengan tak lagi mengindahkan protokol penanganan Covid-19, sewajarnya lah bila umat Islam yang tidak berada di zona merah, untuk diberikan relaksasi, untuk dapat ke Masjid, dan sholat di Masjid, menghidupkan syiar di Masjid dengan kumandangan Adzan, tadarus, termasuk untuk sholat 'Idul Fitri. Khususnya untuk Umat yg berada di kawasan zona hijau, bukan zona merah. Sekalipun tetap harus melak-

sanakan ketentuan-ketentuan dasar terkait penanganan Covid-19", disampaikan Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta (16/05/2020).

Hidayat menjelaskan bahwa relaksasi pembatasan tempat ibadah tetap akan menaati aturan penanganan Covid-19, misalnya jumlah jama'ah yang tidak membludak, tetap ada physical distancing, dll.

Pria yang akrab disapa HNW ini mengutip fatwa MUI yang dikeluarkan berkaitan dengan panduan ibadah pada saat Covid-19, yang menyebutkan bahwa Umat Islam tidak boleh menyelenggarakan ibadah yang mengumpulkan orang banyak jika kondisi penyebaran Covid-19 di kawasan tersebut tidak terkendali.

"Namun, MUI bahkan mewajibkan sholat Jumat di kawasan yang kondisi penyebaran Covid-19nya terkendali. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan kegiatan ibadah menurut fatwa MUI di tempat ibadah sangat bergantung pada kondisi suatu kawasan," ungkapnya.

Hidayat juga prihatin bahwa Fatwa MUI tidak dipahami dengan baik dan utuh, sehingga di banyak



tempat yang bukan zona Merah sekalipun, masjid ditutup, bahkan ada yg digembok.

"Jema'ah juga mutlak dilarang sholat Jumat, sholat Tarawih, dan aktifitas lain, sehingga menghadirkan kehebohan dan ketidak-harmonisan di tingkat akar rumput Umat," tuturnya.

Menurut Hidayat, mempertimbangkan untuk relaksasi pembatasan tempat ibadah di kawasan zona hijau, bukan

zona merah, dengan tetap harus menaati aturan Covid-19 perlu dilakukan untuk menghidupkan keadilan dan ketenteraman umat, sekaligus menghilangkan stigma seolah-olah Covid-19 ini adalah konspirasi kepada umat Islam khususnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Anggota FPKS Apresiasi Islah Ulama dan Petugas PSBB Surabaya

Alhamdulillah, di bulan yang mulia dan menjelang hari raya, akhirnya masalah ini bisa diselesaikan dengan islah. Sikap Habib Umar dan Asmadi yang secara tulus saling memaafkan ini patut kita apresiasi. Tidak hanya tulus, Habib Umar Assegaf juga akan memberangkatkan umroh Asmadi. Masya Allah, sebuah contoh akhlak yang mulia

Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Fraksi PKS DPR RI Sapil Jawa Timur 1

Surabaya (23/05) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari dapil Jatim 1 Sigit Sositomo, mengapresiasi langkah islah antara Habib Umar Assegaf dan Asmadi anggota Satpol PP Surabaya.

"Alhamdulillah, di bulan yang mulia dan menjelang hari raya, akhirnya masalah ini bisa diselesaikan dengan islah. Sikap Habib Umar dan Asmadi yang secara tulus saling

memaafkan ini patut kita apresiasi. Tidak hanya tulus, Habib Umar Assegaf juga akan memberangkatkan umroh Asmadi. Masya Allah, sebuah contoh akhlak yang mulia," kata Sigit, yang juga ketua Wilayah Jawa Timur-Jawa Tengah-DIY DPP PKS

Sigit juga mengapresiasi upaya mediasi yang sudah dilakukan Polda Jatim. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol

Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan, Jumat (22/5/2020) siang, Kapolres Pasuruan, AKBP Rofiq Ripto Himawan bersilaturahmi ke kediaman Habib Umar Assegaf di Bangli, Pasuruan

Melalui silaturahmi itu, Kapolres Pasuruan berupaya menjalin komunikasi terkait insiden yang terjadi di pos PSBB Surabaya.

Dari pertemuan hangat itu, Habib Umar Assegaf telah menyampaikan kesediaan menyeyogom masyarakat, kepolisian sudah menjalankan tugasnya dengan baik." Kata Sigit.

"Upaya mediasi yang dilakukan Polda Jatim juga patut kita apresiasi. Sebagai pengayom masyarakat, kepolisian sudah menjalankan tugasnya dengan baik." Kata Sigit.

Selama masa PSBB, Sigit berharap semua petugas di lapangan bisa bersikap profesional dan lebih mengedepankan sikap persuasif kepada masyarakat. Tindakan kekerasan seperti pemaksaan penurunan



penumpang apalagi kekerasan fisik seperti pemukulan tidak boleh terulang lagi.

Jika ada masyarakat yang melanggar sesuai ketentuan PSBB, kata Sigit, cukup diminta kembali atau melengkapi persyaratan yang diwajibkan.

"Jangan ada lagi kekerasan fisik kepada masyarakat yang melanggar. Kekerasan fisik hanya akan menimbulkan masalah baru. Kekerasan fisik hanya akan menimbulkan masalah baru. Lebih baik dilakukan secara persuasif dan humanis. Ketidaksiplinan masyarakat juga di picu dengan sering berubahnya aturan penanganan covid-19. Kontroversi pulang kampung

dan mudik, pembukaan kembali bandara, terminal, ramainya mall dan tempat-umum lainnya.

Akhirnya di lapangan banyak masyarakat banyak yang kebingungan dan menganggap tidak penting lg aturan2 dlm PSBB," kata Sigit

Sebelumnya, video ketegangan terjadi antara ulama dengan petugas PSBB Surabaya di cekh point viral di media sosial.

Video tersebut menjadi bahan perbincangan netizen di tengah upaya untuk memulihkan dan menghormati tokoh agama dan ulama yang digagas Fraksi PKS DPR RI.

Toriq Hidayat Apresiasi Alim Ulama yang Jaga Masyarakat dari wabah Covid-19

Karena Dapil saya adalah kota santri, maka peran Alim Ulama yang selalu bersama masyarakat, bisa lebih memperkuat kebijakan PSBB dan anjuran pemerintah. Termasuk dalam pembatasan aktivitas keagamaan di rumah ibadah. Ini semua demi wabah Covid-19 cepat usai dan roda kehidupan di sini kembali normal

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

Tasikmalaya (18/05) – Kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2019 – 2020 digunakan Anggota DPR RI asal Fraksi PKS, Toriq Hidayat dengan berkunjung dan bersilaturahmi ke seluruh lapisan masyarakat termasuk para Alim Ulama di Kota Garut dan Ko/Kab. Tasikmalaya. Menyambut 1 syawal 1441 H, Toriq menyiapkan 1.000 kain sarung yang akan diberikan kepada Alim Ulama dan guru ngaji sebagai bentuk apresiasi karena telah memberikan pengajaran kepada masyarakat dalam memotong mata rantai Covid-19 di dapilnya.

"Dalam usaha melawan

virus corona dibutuhkan bantuan dari semua pihak, termasuk ulama. Sebab, upaya Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Covid-19 tak akan optimal jika tak ada dukungan dari masyarakat", ungkap Toriq.

Anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan Kebijakan PSBB di Kota Garut dan Ko/Kab. Tasikmalaya tidak akan optimal bila masyarakat tidak mengerti manfaatnya. Termasuk pembatasan kegiatan keagamaan, hal ini merupakan sesuatu yang sangat sensitif. Namun, hal itu harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona.

"Karena Dapil saya adalah kota santri, maka peran Alim Ulama yang selalu bersama masyarakat, bisa lebih memperkuat kebijakan PSBB dan anjuran pemerintah. Termasuk dalam pembatasan aktivitas keagamaan di rumah ibadah. Ini semua demi wabah Covid-19 cepat usai dan roda kehidupan di sini kembali normal," harap Toriq.

Peran Alim Ulama dalam menjadi panutan masyarakat diperlihatkan saat ratusan ulama dan kiai Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mengikuti rapid test Covid-19 di gedung MUI Kabupaten Tasikmalaya, April lalu. Rapid test dilakukan petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar.

"Alhamdulillah, dari ratusan ulama-kiai di Kabupaten Tasikmalaya yang ikut rapid test, hasil seluruhnya negatif terinfeksi kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Jawa Barat Daud Achmad", Jelas Toriq bersyukur.

Masyarakat bukan sekedar melihat pada ilmunya ulama. Tetapi juga melihat pada opini, pendapat, akhlak dan keseharian kehidupan ulama.



Rofik Hananto Pantau Pos Jaga Lebaran & Gugus Tugas Covid-19

Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas dedikasi para petugas semua. Semoga semua sehat dan lancar dalam menjalankan tugas penting menjaga ketertiban dan ketenangan yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi kondisi wabah seperti sekarang ini,

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

Purbalingga (22/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto, melakukan peninjauan langsung ke Posko Lebaran dan Gugus Tugas Covid -19 di Alun-alun Purbalingga, Jawa Tengah, Kamis, (21/05/2020).

Bertemu dengan Wakapolres Purbalingga beserta jajaran petugas, Rofik menyempatkan diri bercengkerama dan menanyakan berbagai hal terkait kondisi terkini.

"Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas dedikasi para petugas semua. Semoga semua sehat dan lancar dalam menjalankan tu-

gas penting menjaga ketertiban dan ketenangan yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi kondisi wabah seperti sekarang ini," kata Rofik Hananto.

Rofik menambahkan pihaknya turut mendukung dan mendoakan kepada setiap petugas yang bertugas di lapangan dalam pengamanan Idul Fitri 2020 dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

"Kami doakan semoga Pak Polisi dan jajarannya serta Gugus Tugas Covid-19 selalu dalam keadaan sehat wal afiat tak kurang suatu apa. Aamiin,"

doa Rofik.

Pada saat yang sama, Rofik Hananto juga menyerahkan bantuan makanan dan buah tangan bagi para petugas, yang langsung diterima oleh Wakapolres Purbalingga, Bapak Ponco. "Sukses selalu kepada petugas semua", imbuhnya.

Wakapolres Purbalingga, Ponco menyampaikan pesan untuk masyarakat agar tetap di rumah saja dan tidak mudik.

"Seludur semua di rumah saja ya. Biar kami saja yang menjaganya," kata Wakapolres Purbalingga.





Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI
Mengucapkan

Selamat
Idul Fitri
Hari Kemerangan 1 Syawal 1441 H

Mohon Maaf Lahir Batin
Taqabbalallahu minna
wa Minkum

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI
Ketua MKD DPR RI



Akibat Covid-19, Habib Aboe Minta Masyarakat Rayakan Idul Fitri Secara Bijak

Upaya untuk pencegahan Covid-19 ini harus diutamakan. Karena hal ini menyangkut kesehatan dan keselamatan bersama,

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Ketua MKD DPR RI

Jakarta (23/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsy menyatakan Hari Raya Idul Fitri 1441 H di tengah pandemi Covid-19 harus dirayakan dengan bijak.

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe ini, perayaan secara bijak Idul Fitri tahun ini karena sampai dengan saat ini penyebaran korona masih menjadi masalah bersama.

"Upaya untuk pencegahan Covid-19 ini harus diutamakan. Karena hal ini menyangkut kesehatan dan keselamatan bersama," tandasnya.

Silaturahmi, lanjut Habib Aboe, sebagai bagian dari tradisi yang biasa dilaksanakan saat Idul Fitri masih bisa

dikerjakan.

"Kita masih bisa silaturahmi, yaitu dengan memanfaatkan dunia digital, baik melalui telepon, pesan singkat ataupun menggunakan video call. Itu semua, tidak akan mengurangi makna dan keberkahan dari hari raya Idul Fitri, dan tentunya akan menjadi cara untuk berbagi kebahagiaan," pungkas Bendahara Fraksi PKS DPR RI ini.

Habib Aboe menambahkan, silaturahmi melalui virtual menjadi penting disaat pandemi, karena dengannya tentu pikiran kita akan menjadi rileks. Dengan mencegah stres, tentunya akan baik bagi imunitas tubuh. Kondisi fisik

yang prima dan imunitas yang baik sangat diperlukan disaat pandemi covid-19," terang Anggota Komisi III DPR RI ini.

Tentunya, kata Habib Aboe, semua pihak harus menahan diri untuk mengurangi aktifitas di luar. Semua masih harus stay at home, ini harus dipahami dengan baik. Memang akan berasa kurang nyaman di saat hri raya, tapi ini untuk kebaikan bersama.

"Jika pun sangat diperlukan untuk beraktifitas diluar, semua harus mengikuti protokol kesehatan. Mari tetap mawas diri merayakan hari raya Idul Fitri di tengah pandemi," tutup Habib Aboe



Kirim Surat ke Pemerintah

Fraksi PKS Desak Batalkan Kenaikan Iuran BPJS

Kami melaksanakan tugas DPR dan kewajiban Anggota DPR yang diperintahkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga surat Fraksi PKS yang mewakili suara masyarakat luas ini direspon dengan bijak oleh Pemerintah

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (18/05) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS DPR RI) mengirimkan dua surat resmi kepada Pemerintah.

Pertama, surat kepada Menteri Kesehatan untuk membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 akan mengalami kenaikan perbulan Juli 2020 untuk Kelas I dan II serta pada tahun 2021 untuk Kelas III.

Kedua, Fraksi PKS juga mengirimkan surat kepada Menteri ESDM meminta agar Pemerintah dalam hal ini Pertamina menurunkan harga BBM.

Manurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dua surat tersebut dikirimkan Fraksi pada Senin, (18/05/2020), semata-mata untuk merespon dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Surat tersebut juga mencerminkan kesungguhan Fraksi PKS sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

"Kami melaksanakan tugas DPR dan kewajiban Anggota DPR yang diperintahkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan memperjuangkan

kesejahteraan rakyat. Semoga surat Fraksi PKS yang mewakili suara masyarakat luas ini direspon dengan bijak oleh Pemerintah," ungkap Jazuli.

Fraksi PKS DPR, lanjut Jazuli, memiliki argumentasi yang rasional dan objektif meminta Pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS dan menurunkan harga BBM saat ini. Alasan mendasarnya adalah pandemi Covid-19 benar-benar menurunkan penghasilan dan daya beli masyarakat secara drastis. Ekonomi masyarakat benar-benar jatuh, pemenuhan kebutuhan pokok sulit, banyak masyarakat yang jatuh dalam pengangguran dan kemiskinan baru.

"Dalam kondisi demikian sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah membantu warganya meringankan beban ekonomi melalui jaring pengaman sosial yang efektif dan tepat sasaran. Bukan sebaliknya, menambah berat beban ekonomi masyarakat dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan," ungkap Anggota Komisi I DPR RI ini.

Dalam surat Fraksi PKS



kepada Menteri Kesehatan disebutkan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat merupakan hak mendasar bagi setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Fraksi PKS menilai kebijakan kenaikan iuran BPJS keluar disaat yang tidak tepat mengingat seluruh masyarakat Indonesia sedang berjuang melawan pandemi Covid-19, kenaikan iuran BPJS jelas menambah berat beban masyarakat.

Turunkan Harga BBM

Sementara itu, dalam surat

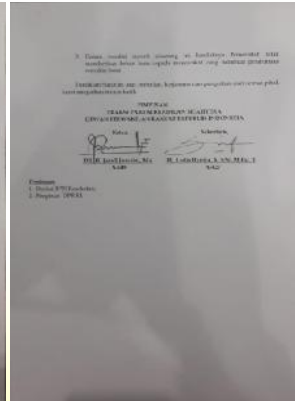
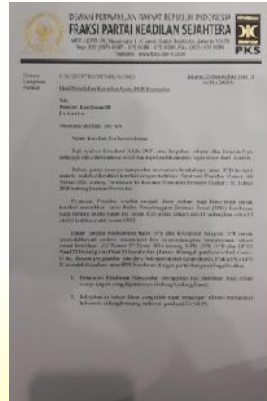
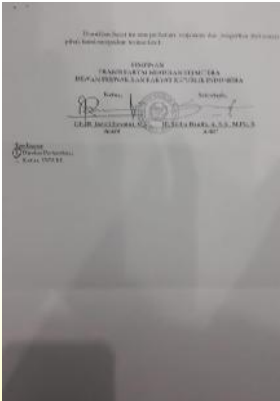
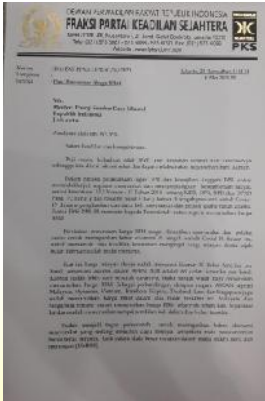
Fraksi PKS yang dikirimkan ke Menteri ESDM, Fraksi PKS melihat alasan rasional penurunan harga BBM oleh Pertamina.

"Kebijakan penurunan harga BBM sangat dinantikan masyarakat dan selaku usaha untuk meringankan beban ekonomi di tengah wabah Covid-19. Selain itu, untuk memenuhi rasa keadilan konsumen mengingat harga minyak dunia sejak bulan Februari sudah mulai menurun," ungkap Jazuli mengutip isi surat.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Surati Pemerintah

FRAKSI PKS MEMINTA BATALKAN KENAIKAN IURAN BPJS & TURUNKAN HARGA BBM



Kami melaksanakan tugas DPR dan kewajiban Anggota DPR yang diperintahkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga surat Fraksi PKS yang mewakili suara masyarakat luas ini direspon dengan bijak oleh Pemerintah

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

PKS Minta Polri Investigasi Meningkatnya Impor Senjata di Masa Pandemi COVID-19

Harus diinvestigasi pihak kepolisian dan diekspose publik simpang siur berita yang telah beredar dan meresahkan tersebut. Perasaan aman damai dan penegakan hukum yang terkendali perlu selalu disebarakan di tengah publik

Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.

Anggota Komisi I DPR RI

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Almuzammil Yusuf meminta kepolisian melakukan investigasi terhadap impor produk senjata dan amunisi yang meningkat tajam di tengah pandemi COVID-19. Sebab, simpang siurnya informasi tersebut bisa meresahkan masyarakat.

"Harus diinvestigasi pihak kepolisian dan diekspose publik simpang siur berita yang telah beredar dan meresahkan tersebut," ujar Almuzammil Yusuf kepada SINDOnews, Rabu (20/5/2020). (Baca juga: Larang Salat Idul Fitri di Luar Rumah, Pemerintah Diminta

Tegas).

Karena, kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Polri berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

"Perasaan aman damai dan penegakan hukum yang terkendali perlu selalu disebarakan di tengah publik," pungkas Legislator asal Dapil Lampung I ini.

Sekadar diketahui sebelumnya, Badan Pusat

Statistik (BPS) pada 15 April 2020 melaporkan bahwa impor produk produk senjata dan amunisi serta bagiannya meningkat tajam pada Maret 2020. Sepanjang bulan Maret dalam laporan BPS, nilai impor senjata mencapai USD187,1 juta atau naik hingga 7.384% dibandingkan dengan Februari 2020 yang hanya USD2,5 juta.





Sukamta: Pemerintah Bantu Pers Agar Produktif dalam Diseminasi Informasi Covid-19

Pemerintah bisa berikan relaksasi pajak hingga mengajak usaha pers dalam kerjasama penyampaian informasi mengenai program, aktivitas dan hal lain terkait Covid-19. Tentunya Segala hal bantuan terhadap pers harus tetap memperhatikan asas ketaatan hukum dan kepatutan masyarakat.

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (17/05) — Anggota Komisi I DRR RI dari Fraksi PKS, Sukamta menyatakan pemerintah harus memberikan perhatian dan membantu usaha pers yang juga ikut terdampak pandemi agar mampu bertahan dan terus produktif dalam membantu pemerintah melakukan diseminasi informasi Covid-19 kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Sukamta melalui pesan tertulis Sabtu malam, (16/05/2020).

"Pers ini punya peran penting dalam pandemi Covid-19 mulai dari diseminasi informasi, edukasi kepada masya-

rakat hingga perang melawan hoax. Tanpa bantuan pers, berbagai informasi pemerintah tidak akan sampai ke masyarakat luas," papar Sukamta.

Maka dari itu, lanjut Sukamta, pemerintah harus membantu usaha pers yang terdiri dari perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita.

"Sebagian usaha pers ini sebelum pandemi datang ada sudah kesulitan karena adanya perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi lewat media elektronik. Saat pandemi datang, kondisi

semakin berat." jelas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Sukamta mengingatkan, sebagaimana skema pemerintah untuk membantuk UMKM dan dunia usaha, juga perlu lakukan langkah yang sama kepada usaha pers.

"Pemerintah bisa berikan relaksasi pajak hingga mengajak usaha pers dalam kerjasama penyampaian informasi mengenai program, aktivitas dan hal lain terkait Covid-19. Tentunya Segala hal bantuan terhadap pers harus tetap memperhatikan asas ketaatan hukum dan kepatutan masyarakat," terangnya.

Namun demikian Sukamta mengingatkan bahwa bantuan pemerintah terhadap usaha pers jangan sampai membuat pers menjadi tumpul, hilang daya kritis terhadap pemerintah.

"Dalam kondisi krisis akibat pandemi seperti ini menurut Sukamta peluang penyimpangan dari sisi kebijakan dan anggaran semakin besar akibat diskresi aturan yang dapat memicu



moral hazard penyelenggara negara, maka disini pers punya peran penting menjadi saluran masyarakat untuk ikut mengkritisi kebijakan yang menyimpang," tegas Sukamta.

Menurut Sukamta, hal ini perlu dilakukan Pemerintah, mengajak pers sebagai pilar keempat dari demokrasi harus bisa menjaga independensi dengan pemerintah dengan tetap mengedepankan kode etik jurnalistik.

"Kita tahu selama masa pandemi Covid-19 pers telah banyak berperan dalam membangun kesadaran publik

untuk melakukan physical dan social distancing. Namun demikian terkadang pers hanya menyambungkan suara dari pemerintah tanpa memberikan perbandingan yang kuat. Khususnya konten media straight news yang mungkin lebih banyak digemari masyarakat dan itu menguntungkan bagi media. Tentu akan kita harap pers juga menyajikan konten-konten berita yang mengupas secara mendalam sehingga punya nilai edukasi yang bermanfaat ke publik," pungkas Sukamta mengakhiri.

Mardani: KPU Harus Jaga Keamanan Data dan Perkuat Sistem IT

“KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus menjaga keamanan data dan juga menjadikan pelajaran untuk lebih memperkuat sistem keamanan IT. Ini sangat berkaitan erat dalam menjaga ‘trust’ dan kredibilitas di masyarakat

Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (22/05) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjaga keamanan data serta memperkuat sistem informasi teknologi.

Hal tersebut, Menurut Mardani lantaran ada dugaan data 2,3 juta data warga Indonesia dari sistem KPU diklaim diretas hacker.

“KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus menjaga keamanan data dan juga menjadikan pelajaran untuk lebih memperkuat sistem keamanan IT. Ini sangat berkaitan erat dalam menjaga ‘trust’ dan kredibilitas di masyarakat,” kata

Mardani, Jumat (22/05).

Indonesia dikagetkan dengan claim seorang Peretas dari akun twitter @underthebreach, Kamis (21/5/2020) yang mengklaim telah membobol data 2,3 juta warga Indonesia dari sistem KPU. Dalam cuitnya ia mengatakan berhasil mendapat, data termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya.

Ketua DPP PKS itu juga minta perlunya audit sistem keamanan data dan sistem informasi teknologi KPU agar tidak terulang kejadian yang sama.

“Saya usulkan perlu diaudit seluruhnya oleh konsultan independent, jadi

bahan masukan untuk perbaikan kedepannya,” ujar Mardani.

Selain itu, Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur itu juga ia minta kejadian ini menjadi pelajaran kepada pemerintah agar sistem keamanan data nasional ditinjau ulang.

“Harus jadi momentum meninjau keamanan data kependudukan nasional, saya mengusulkan program KTP-el yang saat ini sifatnya sentralistis sekaligus di tinjau ulang keamanan data dan sistem IT nya agar tidak mendatangkan bencana nasional,” pungkasnya.



Nasir Djamil: Praktik Jual Beli Surat Sehat Cederai Pengorbanan Tenaga Medis

Tindakan masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan dengan melanggar PSBB sejatinya telah mencederai hati para tenaga medis. Apalagi jika mereka melakukan intrik-intrik untuk mengelabui aparat yang salah satunya dengan menggunakan surat sehat dan surat tugas abal-abal. Tidak boleh dibiarkan karena ini juga membuat para tenaga medis seperti tidak dihargai pengorbanannya

H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (20/05) — Penumpukan penumpang yang sempat terjadi di Bandar Udara Soekarno-Hatta tanpa mengindahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menuai kecaman dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Nasir Djamil.

Menurutnya, kejadian itu tidak lepas dari tidak adanya ketegasan dari pemerintah dalam menghadapi Covid-19.

Selain itu, kebijakan yang diterbitkan juga membingungkan masyarakat.

Secara khusus, Nasir Djamil lantas menyoroti para penumpang yang memadati Bandara Soetta dengan mengantongi surat izin sehat yang diduga dibuat-buat.

Pihaknya meminta aparat keamanan untuk menyelidiki lebih dalam adanya dugaan jual

beli surat tugas dan surat sehat untuk menjadi jalan pintas masyarakat.

“Kami meminta aparat kepolisian agar lebih intens mendalami dugaan adanya surat bebas covid yang dijual secara online. Jika dibiarkan, maka ini akan membuat Indonesia semakin bahaya dan sulit melepaskan diri dari pandemi Covid-19 dalam waktu dekat,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOI, Minggu (17/5).

Politisi asal Aceh ini mengatakan, tindakan masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan dengan melanggar PSBB sejatinya telah mencederai hati para tenaga medis. Apalagi jika mereka melakukan intrik-intrik untuk mengelabui aparat yang salah satunya dengan menggunakan surat sehat dan surat tugas abal-abal.

“Tidak boleh dibiarkan karena ini juga membuat para tenaga medis seperti tidak dihargai pengorbanannya,” tegasnya.



Maklumat Kapolri Terkait Covid-19,

Habib Aboe Minta Penerapan dijalankan secara Adil

Harus dipahami, bahwa dalam situasi krisis seperti ini psikologi masyarakat sangat rentan dengan isu sensitif. Karenanya, perlakuan yang sepadan oleh aparat dalam menjalankan aturan akan menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban di masyarakat

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (20/05) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsy mengkritisi pelaksanaan Maklumat yang dikeluarkan Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona.

"Saya minta Maklumat Kapolri diterapkan secara konsekuen, jangan terlihat pelaksanaannya hanya tegas kepada masjid dan kegiatan umat Islam saja," ungkap pria yang akrab disapa Habib Aboe.

Menurut Habib Aboe, Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan

Penyebaran Virus Corona semangatnya adalah melakukan pembatasan pengumpulan massa yang berpotensi menyebarkan covid-19. Jadi pelaksanaannya harus konsisten pada semua bidang.

"Saya banyak menerima keluhan dari masyarakat, mereka menanyakan kenapa pembatasan aktifitas di masjid, pengajian dan tablig akbar sangat ketat, namun tidak demikian untuk aktifitas lain," tanya Habib Aboe.

Misalkan saja, kata Habib Aboe, acara Penutupan Gerai McDonald di Sarinah, keramaian di bandara serta kepadatan di beberapa pusat pembelanjaan

seperti di Roxy Jember, perbelanjaan Cakranegara Mataram.

"Ada yang juga bertanya kepada saya, kenapa acara peringatan Nuzulul Qur'an tidak diizinkan sedangkan konser musik diperbolehkan," terangnya.

Point dua, lanjutnya, maklumat Kapolri melarang kegiatan pengumpulan massa dalam bentuk konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga.

"Tentunya aparat harus berpedoman pada maklumat Kapolri dan menerapkannya dengan prinsip *equality before the law*," tandasnya.

Harus dipahami, lanjut Habib Aboe bahwa dalam situasi krisis seperti ini psikologi masyarakat sangat rentan dengan isu sensitif.

"Karenanya, perlakuan yang sepadan oleh aparat dalam menjalankan aturan akan menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban di masyarakat," terangnya.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Terkait Penanganan Pandemi, Hermanto Minta Limbah Covid-19 Dikelola Serius

Dampak dari Pandemi Covid-19 sudah tampak nyata berupa limbah buangan yang kita sebut dengan sampah infeksius. Sampah ini bisa menjadi agen penularan virus corona kepada orang sehat. Karena itu, sampah ini harus dikelola dengan serius.

"Pada rapat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum lama ini saya minta menteri untuk mengadakan bak sampah, motor sampah, dan masyarakat yang mengolah sampah agar ditunjang dengan anggaran yang cukup.

Dr. Hermanto, S.E., M.M.

Anggota Komisi IV DPR RI

[f](#) Fraksi PKS DPR RI [i](#) fraksipksdprri [t](#) @fpksdpri [globe](#) fraksi.pks.id



Terkait Penanganan Pandemi

Hermanto Minta Limbah Covid-19 Dikelola Serius

Pada rapat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum lama ini saya minta menteri untuk mengadakan bak sampah, motor sampah, dan masyarakat yang mengolah sampah agar ditunjang dengan anggaran yang cukup. Untuk anggaran yang sudah dialokasikan, agar segera direalisasikan",

Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Padang (23/05) — Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Hermanto, dalam perjalanan dinasny ke daerah pemilihan berkesempatan hadir sebagai narasumber utama (keynote speaker) pada kegiatan Sosialisasi Penanganan Limbah Infeksius Covid-19 pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan secara daring di Padang.

Dalam kesempatan tersebut, Hermanto menegaskan bahwa limbah Covid-19 harus dikelola serius.

"Dampak dari Pandemi

Covid-19 sudah tampak nyata berupa limbah buangan yang kita sebut dengan sampah infeksius. Sampah ini bisa menjadi agen penularan virus corona kepada orang sehat", papar Hermanto.

Karena itu, lanjutnya, sampah ini harus dikelola dengan serius.

"Pada rapat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum lama ini saya minta menteri untuk mengadakan bak sampah, motor sampah, dan masyarakat yang mengolah sampah agar

ditunjang dengan anggaran yang cukup", tutur legislator dari FPKS DPR ini.

"Untuk anggaran yang sudah dialokasikan, agar segera direalisasikan", tambahny.

Kegiatan ini, jelasny, merupakan salahsatu realisasi anggaran penanganan covid-19 tersebut. Realisasi anggaran yang lain, dalam waktu dekat akan turun bantuan ke RSUD-RSUD sarana dan prasarana penanganan limbah covid-19 berupa: drop box limbah B3, plastik pengumpul Limbah B3 dan APD petugas pengelola limbah B3.

"Bagi kelompok masyarakat ada bantuan kendaraan pendukung penyemprotan disinfektan plus tangki dan pompa", ungkap legislator dari dapil Sumbar 1 ini.

Disamping hadir sebagai narasumber utama, Hermanto juga secara simbolis menyerahkan bantuan sarana prasarana pengolahan sampah kepada 5 RSUD dan masyarakat di Sumatera Barat kepada Direktur RSUD Padang



Herlin Sridiani. Untuk Sumatera Barat dialokasikan bantuan sarana dan prasarana berupa 35 unit drop box limbah B3, 7000 lembar plastik pengumpul Limbah B3, 200 paket APD petugas pengelola limbah B3 dan dan 5 Kendaraan pendukung penyemprotan disinfektan plus tangki dan pompa.

Kegiatan sosialisasi secara

daring ini diikuti oleh narasumber lain dan peserta di 6 lokasi yaitu RSUD dr. Rasyidin Kota Padang (lokasi utama), Direktorat Pengolahan Sampah Jakarta, Kantor Dinas Kesehatan Kota Padang, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, RSUP M Djamil Kota Padang dan Kantor LSM Mitra Ummat Padang.

Buruknya Manajemen Pemerintahan di Pusat Jangan dibawa ke Daerah

keluarnya peraturan Menteri Keuangan tersebut menunjukkan buruknya manajemen Pemerintahan Jokowi. Menkeu seharusnya mengatur tentang mekanisme teknis pencairan dan laporan, tapi justru membuat kebijakan yang bukan tupoksinya

H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (20/05) — Keluarnya peraturan Menteri Keuangan No 50 tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa, mendapat sorotan Anggota DPR RI Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama.

Menurut pria yang akrab disapa SJP ini, keluarnya peraturan Menteri Keuangan tersebut menunjukkan buruknya manajemen Pemerintahan Jokowi.

"Menkeu seharusnya mengatur tentang mekanisme teknis pencairan dan laporan, tapi justru membuat kebijakan yang bukan tupoksinya," kritik SJP.

PMK ini, lanjut Suryadi, akan menimbulkan kegaduhan di desa dan pemda. Beban BLT dari dana desa di tambah tanpa menambah jumlah anggaran.

"Ini akan sangat memberatkan pemerintah desa. Disamping akan menimbulkan kecemburuan karena warga desa yang dapat dari bantuan jenis lain hanya 3 bulan, sedangkan dari dana desa untuk 6 bulan," pungkasnya.

Selain itu, kata Suryadi, bertambahnya beban anggaran untuk 6 bulan, akan membutuhkan tambahan dana, sementara batas maksimal

35% dari dana desa.

"Ini jelas tidak cukup. Konsekuensinya harus mengurangi jumlah penerima. Ini juga akan membuat kekacauan di masyarakat," tandas Anggota Komisi V DPR RI ini.

SJP menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan kekacauan manajemen pemerintahan di pusat ditularkan dan akan berpindah juga ke daerah dan desa.

"Kita minta Presiden Jokowi segera memperbaiki manajemen pemerintahan dengan cara : Pertama, Konsisten memberikan arahan dan kebijakan, jangan berubah-ubah supaya para menteri tidak bingung", paparnya.

Kedua, tambah Suryadi, Rubah struktur gugus tugas dengan dipimpin pejabat setingkat Menteri Koordinator atau Menko supaya bisa mengkoordini sejumlah Kementerian, bukan dipimpin pejabat setingkat eselon I.

"Ketiga, tertibkan menteri yg mengatur kebijakan di luar tupoksinya bahkan melampaui



kebijakan presiden seperti Menteri Keuangan dan LBP," tegasnya.

Sebagai contoh, kata Suryadi, Menteri Keuangan bisa membatalkan perpres dalam realokasi anggaran, sementara perpres tdk dicabut dan pada saat yang sama ada SK Menteri Keuangan yang menyebutkan

anggaran yang direalokasi utk covid berbeda dengan perpres.

"Sayangnya para menteri justru tidak mengikuti perpres dan menganggap tidak ada, tapi mematuhi SK Menteri Keuangan dalam melaksanakan kegiatan," tutupnya.

Legislator PKS Dukung KPPU Selidiki Dugaan Monopoli BBM

"Saya acungkan jempol kepada KPPU yang proaktif melakukan penyelidikan terhadap permainan harga BBM non-subsidi ini. Saya yakin ini bukan pekerjaan mudah karena ada banyak pihak yang berkepentingan dengan harga jual BBM non-subsidi. Bukan tidak mungkin dalam proses penyelidikan nanti KPPU akan mendapat tantangan dan tekanan besar dari pihak tertentu yang merasa terancam.

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Tangerang Selatan (16/05) — Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mendukung langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki dugaan tindak monopoli harga BBM non-subsidi yang dilakukan lima perusahaan migas.

Kelima perusahaan yang masih dirahasiakan namanya diduga melakukan kesepakatan untuk tidak menurunkan harga BBM non-subsidi meskipun harga minyak dunia anjlok.

Melalui juru bicaranya

KPPU mengaku sudah memiliki bukti awal adanya praktek monopoli harga BBM non-subsidi. Kelima perusahaan itu dianggap melanggar Pasal 5, UU Nomor 5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di mana disebutkan; pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada

pasar bersangkutan yang sama. KPPU menduga kesepakatan tidak menurunkan harga BBM ini berlangsung sejak Maret 2020.

"Jika dugaan tersebut terbukti PKS minta semua pihak terkait diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Pertamina dan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, harus bertanggungjawab karena menjadi contoh dalam perlombaan tahan harga BBM ini," kata Mulyanto.

Anggota Komisi VII DPR-RI ini menegaskan PKS akan mengawal proses penyelidikan dugaan monopoli lima perusahaan migas ini oleh KPPU. Bagi PKS, dugaan monopoli ini adalah konspirasi jahat yang merugikan rakyat. Untuk itu harus diusut tuntas.

"Saya acungkan jempol kepada KPPU yang proaktif melakukan penyelidikan terhadap permainan harga BBM non-subsidi ini. Saya yakin ini bukan pekerjaan mudah karena ada banyak pihak yang berkepentingan dengan harga jual BBM non-subsidi.

Bukan tidak mungkin dalam proses penyelidikan nanti KPPU akan mendapat



tantangan dan tekanan besar dari pihak tertentu yang merasa terancam.

Untuk itu PKS akan bantu mengawasi agar proses penyelidikan ini dapat berjalan lancar. Bagi PKS masalah ini harus dibuka secara transparan agar rakyat bisa mendapatkan haknya secara utuh," tegas Mulyanto.

Mantan Irjen Kementerian Pertanian ini mengaku prihatin.

Dalam kondisi sulit seperti sekarang, akibat dampak pandemi Covid 19, masih ada saja pihak yang tega mengambil keuntungan secara tidak wajar di atas penderitaan rakyat.

Mulyanto menyebut pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan oligopoli itu tidak bernurani sehingga tega menghilangkan hak rakyat mendapatkan harga BBM murah.

Sidak ke Desa Ciomas

Nurhasan Zaidi: DTKS Kemensos Bermasalah!

Ini temuan yang sangat Memprihatinkan di lapangan bagi kami lembaga legislatif terkait validasi data penerima bantuan. Dengan tidak validnya data yang diserahkan pihak desa dengan data yang keluar dari Kemensos sehingga banyak menimbulkan kecemburuan sosial.

H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IX

Majalengka (19/05) — Anggota DPR RI dari Komisi VIII Fraksi PKS Nurhasan Zaidi menemukan banyak data yang tidak sinkron, antara data yang diserahkan oleh pihak pemerintah desa dengan feedback data dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Hal itu terungkap setelah terjadi dialog antara Nurhasan dengan Kepala Desa Ciomas Kecamatan Sukahaji Majalengka terkait validasi data penerima bantuan dari Pemerintah saat pandemi Covid-19.

"Ini temuan yang sangat memprihatinkan di lapangan bagi kami lembaga legislatif terkait validasi data penerima bantuan," ujar Nurhasan, Senin

(18/05/2020).

Di sela sidak bantuan sosial tunai dari Kemensos kepada masyarakat Kabupaten Majalengka yang bertempat di Kantor Pos Sukahaji, dirinya sangat menyalkan atas terjadinya tidak sinkronnya DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang menyebabkan ketidak harmonisan di tengah masyarakat

"Dengan tidak validnya data yang diserahkan pihak desa dengan data yang keluar dari Kemensos sehingga banyak menimbulkan kecemburuan sosial," ucap Anggota Legislatif dari Fraksi PKS tersebut.

Sementara itu, Kepala

Desa Ciomas Kecamatan Sukahaji Majalengka, Budi menjelaskan, selama ini pihaknya sigap terhadap instruksi dari Pemerintah Pusat terkait pendataan ulang DTKS yang berada di lingkungannya.

Akan tetapi, Budi merasa kecewa terhadap hasil data yang muncul dari Kemensos bertolak belakang dengan data rekapan validasi desa.

"Dari awal kita langsung validasi data terbaru warga kita yang terdampak Covid-19, tetapi ketika bantuan turun dari pemerintah yang keluar datanya hasil validasi tahun 2015," tandasnya



Tidak Sesuai Fatwa MUI

HNW Kritik Pemerintah Generalisasi Larangan Salat Idul Fitri di Masjid

fatwa MUI No 28/2020 jelas membedakan dengan menyebutkan tentang bolehnya umat Islam menyelenggarakan salat Idulfitri di tanah lapang, masjid, musala, dan lain-lain bila umat Islam berada di kawasan zona hijau, kawasan yang penyebaran Covid-19 sudah terkendali. Atau yang diyakini tidak terjadi penyebaran Covid-19,

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

Jakarta (21/05) – Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dalam penanggulangan Covid-19.

Banyak umat Islam yang merasa kesal akibat terjadinya ketidakadilan dan tindakan tendensius terhadap umat Islam terkait dengan kebijakan

mengatasi Covid-19.

Beberapa waktu lalu hati umat Islam terluka gara-gara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mengadakan survei tendensius yang ditujukan kepada umat Islam. Survei itu menyebutkan perlu adanya sanksi sosial atau denda bagi umat Islam yang masih berjamaah di masjid saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kini muncul pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD, bahwa umat Islam yang salat Idulfitri di masjid atau lapangan dalam kondisi pandemi Covid-19 melanggar Undang-Undang (UU). Menurut Mahfud, hal itu sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid atau yang akrab disapa HNW memahami keke-salan banyak umat Islam itu.

Terkait pernyataan Mahfud, HNW mengungkapkan, fatwa MUI No 28/2020 tidak menggeneralisasi dengan melarang mutlak salat Id di masjid maupun di lapangan. Salat Idulfitri hanya dilaksanakan di rumah di seluruh kawasan yang oleh pemerintah dimasukkan pada kategori zona merah. Karena itu diberlakukan PSBB, sebagaimana berlaku di banyak kota/provinsi, atau di sebagian besar kota/provinsi yang belum memberlakukan PSBB, dan masih dalam kategori zona hijau.

“Padahal fatwa MUI No



28/2020 jelas membedakan dengan menyebutkan tentang bolehnya umat Islam menyelenggarakan salat Idulfitri di tanah lapang, masjid, musala, dan lain-lain bila umat Islam berada di kawasan zona hijau, kawasan yang penyebaran Covid-19 sudah terkendali. Atau yang diyakini tidak terjadi penyebaran Covid-19,” kata HNW dalam keterangan tertulis yang diterima obsessionnews.com, Rabu (20/5/2020).

Tetapi, lanjut politisi PKS ini, bila kondisi penyebaran Covid-19 masih belum terkendali, yakni berada di zona merah dan diberlakukan PSBB, maka fatwa MUI memang

menyebutkan umat Islam boleh menyelenggarakan salat Idulfitri di rumah. Dalam kedua kondisi itu fatwa MUI menyebutkan tetap dengan harus melaksanakan protokol penanganan Covid-19.

“Sikap pemerintah yang menggeneralisasi pelarangan pelaksanaan Idulfitri untuk setiap wilayah, tanpa membedakan zona merah atau zona hijau, tidaklah bijaksana, dan tidak mencerminkan keadilan. Dan tidak sesuai dengan teks tersurat fatwa MUI,” kritik HNW.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Mufida Minta Pemerintah Jangan Asal Lakukan Relaksasi PSBB

Jangan sampai para dokter dan tenaga kesehatan lain yang sudah banyak berkorban dan bekerja tak kenal lelah, harus kembali menjadi korban kebijakan yang tidak tepat

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (18/05) — Pemerintah berencana melakukan relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan mengijinkan orang dengan usia 45 tahun kebawah untuk beraktivitas di luar untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Pelonggaran ini juga dimaksudkan agar ekonomi mulai kembali bergerak setelah selama 2 bulan dilakukan berbagai kegiatan ekonomi. Namun dalam melakukan kegiatannya, kegiatan bekerja atau aktivitas ekonomi lain harus tetap memenuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19.

Anggota Komisi IX DPR

dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar rencana melakukan pelonggaran ini harus didahului dengan sosialisasi dan yang terpenting juga edukasi secara massif kepada masyarakat.

"Sosialisasi dan edukasi untuk menjelaskan pelonggaran seperti apa yang dilakukan, siapa yang dibolehkan beraktivitas dan kegiatan apa saja yang boleh dilakukan kepada kelompok usia yang diberikan pelonggaran," ungkapnya.

Hal ini, kata Mufida, mengingat tingkat pertambahan kasus baru positif covid-19 masih fluktuatif dan berada di level yang tinggi. Korban meninggal

dunia juga masih cukup tinggi

"Edukasi juga harus menjelaskan protokol kesehatan yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas seperti tetap memakai masker atau pelindung wajah, selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, tidak menyentuh wajah kecuali tangan sudah steril, tetap selalu menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan dan langung mandi setelah kembali ke rumah serta mencuci baju yang dipakai dengan deterjen," terang Mufida.

Sosialisasi dan edukasi ini sangat penting, kata Mufida, agar pelonggaran ini tidak disalah artikan oleh masyarakat dengan euforia kebebasan dan secara bebas keluar atau menjalai kehidupan seperti sebelum pandemi tanpa menghiraukan potensi penyebaran yang masih sangat mungkin terjadi.

"Sosialisasi dan Edukasi pun perlu dilakukan dengan cara dan media yang tepat seperti penggunaan media sosial maupun media elektronik dengan penjelasan yang



menarik," tegasnya.

Mufida juga meminta agar pelonggaran dilakukan secara bertahap dan diikuti evaluasi.

"Pada tahap pertama misalnya pelonggaran bisa dilakukan pada kelompok usia produktif 17-44 tahun dengan kondisi fisik yang sehat agar bisa beraktivitas ekonomi. Sehingga anak-anak maupun usia sekolah tidak bebas berada diluar," imbuhnya.

Pelonggaran, katanya, betul-betul ditujukan untuk menggerakan ekonomi secara bertahap dan membantu keluarga untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini juga mengingatkan, setelah pelonggaran dilakukan, segera diikuti dengan melakukan evaluasi cepat misalnya 2 minggu setelah pelonggaran.

"Evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas pelonggaran dalam menggerakan perekonomian dan tetap terkendalinya penyebaran virus c-19. Jika ternyata pelonggaran ini justru memberi dampak negatif, maka pemerintah harus berani menarik kembali kebijakan pelonggaran ini," tandasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Naikkan Luran BPJS
di Tengah Covid-19

Dimana Rasa Empati Pemerintah?

saat seperti ini pemerintah seharusnya melonggarkan segala bentuk tanggungan masyarakat, bukan justru tambah membebani. Kalau kondisinya seperti sekarang, negara lain justru berusaha buat mensubsidi rakyatnya seperti negara Inggris yang akan melakukan apa saja untuk mensubsidi NHS (National Health Services), sementara pemerintah kita malah menambah beban, makanya saya bilang negara kita memang beda,

Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI

Naikkan Iuran BPJS di Tengah Covid-19

Netty: Dimana Rasa Empati Pemerintah?

pemerintah sanggup buang-buang uang untuk Program Kartu Prakerja yang tidak jelas ada manfaatnya. Masak ngasi stimulus ke perusahaan-perusahaan besar sanggup, sementara mengurangi beban rakyat tidak mau, kan ini patut dipertanyakan

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (16/05) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Heryawan, mengkritik kebijakan pemerintah yang menaikkan iuran BPJS melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020.

Dalam Perpres ini, lanjut Netty, Pemerintah memutuskan iuran peserta PBPJU dan peserta BP kelas 1 sebesar Rp150.000, kelas 2 yakni sebesar Rp100.000, dan kelas 3, iuran yang ditetapkan sebesar Rp42.000.

"Angka ini lebih rendah dari Perpres 75/2019 yang sebesar Rp 160.000 kelas I, kelas II sebesar Rp 110.000,

dan Rp 51.000 kelas III yang beberapa waktu lalu dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena digugat oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI)", terangnya.

Apalagi menurut Netty, kenaikan iuran BPJS ini justru dilakukan pemerintah saat kesehatan dan ekonomi rakyat dihantam badai Covid-19.

"Negara kita memang beda, saat rakyat butuh bantuan karena hantaman Corona, justru pemerintah menaikkan iuran," kata Netty.

Menurut Netty, saat seperti ini pemerintah seharusnya melonggarkan segala bentuk tanggungan masyarakat, bukan

justru tambah membebani.

"Kalau kondisinya seperti sekarang, negara lain justru berusaha buat mensubsidi rakyatnya seperti negara Inggris yang akan melakukan apa saja untuk mensubsidi NHS (National Health Services), sementara pemerintah kita malah menambah beban, makanya saya bilang negara kita memang beda," terang Netty.

Padaحال selama ini, kata Netty pemerintah punya uang buat memberikan stimulus untuk korporasi-korporasi besar.

Tidak hanya itu, pemerintah menurut Netty, juga sanggup buang-buang uang untuk Program Kartu Prakerja yang tidak jelas ada manfaatnya.

"Masak ngasi stimulus ke perusahaan-perusahaan besar sanggup, sementara mengurangi beban rakyat tidak mau, kan ini patut dipertanyakan" katanya.

Menaikkan iuran BPJS, juga belum tentu bisa mengurangi defisit yang dialami BPJS, justru kalau tidak cermat bakal memperlebar defisit.

"Salah-salah justru bisa memperlebar defisit karena



orang-orang akan ramai-ramai pindah kelas, dari kelas I dan II bisa saja pindah ke kelas III. Orang-orang juga bakal malas buat bayar, mengingat ekonomi masyarakat menurun karena Covid-19" ujar Netty.

"Keputusan MA kemarin kan jelas, beberapa alasan dikabulkannya gugatan atas Perpres 75/2019 itu karena keuangan BPJS tidak transparan, ditambah lagi bonus yang berlebihan untuk pejabat BPJS, juga banyak perusahaan yang tidak bayar BPJS, harusnya ini yang dikoreksi bukan malah

menambah beban rakyat" tambah Netty.

Netty meminta agar pemerintah tidak bermain-main dan mengakali hukum dengan menerbitkan Perpres 64/2020 ini.

Pemerintah, katanya harus menjadi contoh sebagai institusi yang baik dan taat pada hukum, jangan malah sebaliknya.

"Sedih melihat nasib rakyat Indonesia, sudah jatuh dihantam Corona kini tertimpa tangga BPJS" tutup Netty.

Rencana Pembukaan Sekolah Juli

Fikri Faqih: Resiko Siapa yang Jamin?

“Kita semua ingin kembali normal, tapi apakah ada jaminan resiko pandemi tidak akan muncul kembali sebagai gelombang kedua? “Apakah sudah ada tanda-tanda kurva pandemi mencapai puncak, karena setelah lewat puncak, baru mulai menurun grafiknya

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Semarang (18/05) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih mempertanyakan rencana pemerintah membuka kembali sekolah mulai Juli mendatang. “Kita semua ingin kembali normal, tapi apakah ada jaminan resiko pandemi tidak akan muncul kembali sebagai gelombang kedua?” katanya, sabtu (16/05/2020).

Secara khusus, politisi PKS ini meminta kejelasan soal kondisi Pandemi Covid-19 yang di Indonesia sudah berjalan dua bulan lebih terhitung sejak tanggal 2 Maret, saat pasien

pertama terkonfirmasi positif virus SARS-Cov-2 itu.

“Apakah sudah ada tanda-tanda kurva pandemi mencapai puncak, karena setelah lewat puncak, baru mulai menurun grafisnya,” kata Fikri.

Menurut perhitungan ahli epidemiologi, setiap periode wabah atau pandemi akan selalu membentuk kurva, dimana ada fase menanjak, kemudian mencapai puncak, dan akhirnya menurun.

“Harapannya adalah kurva berbentuk melandai, artinya puncak wabah tidak terlalu tinggi atau jumlah korban tidak

terlalu besar,” imbuh Fikri.

Dia meminta justru yang mesti dilakukan pemerintah saat ini adalah mengevaluasi kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang belakangan mulai dikendorkan.

“Kita lihat sekarang ada pembukaan transportasi umum, di bandara penumpang menumpuk, masyarakat mulai memadati mall jelang lebaran, apakah kita yakin Juli akan selesai wabah ini, atau malah meningkat lagi?” ujarnya.

Fikri menegaskan, apabila ingin wabah cepat selesai, anak-anak kembali ke sekolah secara normal.

“Seharusnya semua pihak mematuhi PSBB, pemerintah harus memperketat kebijakan PSBB, berkorban sekarang tidak apa, untuk bahagia selanjutnya,” ucap dia.

Sebelumnya, wakil rakyat asal Tegal Jawa Tengah ini telah meminta pemerintah dan pihak terkait lebih mencermati soal proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan wacana dibukanya sekolah kembali di tengah pandemi Covid-19.

Pengumuman pendaftaran



PPDB sudah mulai berjalan secara nasional, sesuai dengan aturan dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB tingkat TK hingga SMA/K, bahwa pengumuman pendaftaran PPDB selambat-lambatnya pada pekan pertama bulan Mei.

“Di masa seperti sekarang, idealnya PPDB dan proses belajar secara daring, namun kendala masih banyak di sana-sini,” kata Fikri.

Selain itu, Fikri juga memberikan syarat apabila pemerintah berniat untuk membuka kembali sekolah dengan sistem tatap muka.

“Harus ada progress (perkembangan) data terkait pandemi Covid-19 yang baik dan benar,” tegasnya.

Fikri menambahkan, ‘baik’ artinya angka-angka terkait pasien yang positif, orang dalam pantauan (ODP), maupun pasien dalam pengawasan (PDP) menurun signifikan.

“Idealnya mendekati nol pertumbuhan pasien baru positif Covid,” ucapnya

Dan ‘benar’ artinya data-data yang digunakan sebagai acuan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

“Artinya harus mempertimbangkan juga analisis lintas pakar epidemiologi, medis, dan akademisi soal resiko & mitigasi apabila terjadi gelombang kedua pandemi Covid yang sudah menjadi fakta di beberapa negara,” tutup Fikri.

Belum Turunnya Kasus Covid-19

Fahmy Alaydroes: Jangan Aktifkan Sekolah!

Bagaimana memastikan bahwa mereka dapat belajar dengan tenang, dan sekaligus aman dari ancaman penularan Covid-19? Apakah sekolah sudah siap menjalankan dan menerapkan Protokol kesehatan kepada semua siswa, pada setiap aktivitas pembelajaran

Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (28/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes, menyortir rencana mengaktifkan kegiatan belajar mengajar di sekolah, disaat kondisi Pandemi Covid-19 yang masih belum menentu dan grafik korban masih terus meroket.

Berdasarkan data, jumlah yang positif tertinfeksi Covid-19 hingga Rabu (27/5/2020) pukul 12.00 WIB, ada 23.851 kasus atau bertambah 686 kasus dari hari sebelumnya.

Adapun jumlah korban meninggal dunia sebanyak 1.473 atau bertambah 50 orang dari

hari sebelumnya dan menyebar ke 31 Provinsi di Indonesia.

"Prediksi kapan akan berakhir, masih simpang siur dan cenderung semakin mundur ke belakang. Semula diperkirakan Pandemi Covid-19 akan berakhir bulan Juni 2020, dan situasi kembali normal pada Juli," ungkap Anggota Komisi X DPR RI ini.

Prediksi itu, lanjut Fahmy, dikemukakan oleh Singapore University of Technology and Design (SUTD) Data-Driven Innovation Lab.

"Prediksi itu kemudian berubah, bahwa akhir pandemi

Covid-19 di Indonesia terjadi pada 23 September 2020 atau mundur lebih dari 3 bulan," pungkasnya.

Kemudian dalam perkembangannya, katanya, prediksi itu kembali berubah. Terakhir dalam laporan yang di-update pada Selasa (5/5/2020), prediksi itu kembali mundur menjadi Oktober 2020.

"Secara teoritis, akhir pandemi Covid-19 terjadi pada 7 Oktober 2020. Prediksi itu bisa meleset 14,9 hari. Ironinya, kemudian Pemerintah akan memberlakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar," tandas Fahmy.

"Kehidupan dan aktivitas kantor, pusat-pusat perbelanjaan, mall, sekolah, penerbangan, transportasi dan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi akan dikembalikan seperti biasa. Tentu saja, dengan tetap memberlakukan aturan protokol kesehatan," imbuhnya.

Entah kenapa, lanjut Fahmy, sejalan dengan adanya keinginan Pemerintah untuk mengendurkan PSBB, didahului dengan pernyataan Presiden



Jokowi bahwa kita harus berdamai dengan Covid-19, berbagai pandangan, penjelasan, bahkan propaganda menyebar di medsos, memposisikan Covid-19 sebagai flu biasa, tidak terlalu berbahaya, dan kalaulpun meninggal karena dibarengi penyakit lainnya.

"Meski faktanya pandemi Covid-19 ini telah menjatuhkan korban meninggal dunia yang banyak, baik yang terdapat dan diumumkan resmi, ataupun yang tidak dicatat atau dikategorikan meninggal karena covid-19 karena belum sempat dites, meski gejala sakitnya didominasi oleh gejala Covid-19", urainya.

Dengan rencana penyudatan kebijakan PSBB, katanya,

maka kita berada dalam suasana yang disebut sebagai keadaan kehidupan 'new-normal', berperilaku sehari-hari seperti biasa tapi dengan tetap waspada dan atisipatif terhadap pandemic Covid-19 yang masih mengancam kita.

Pemerintah yang diberi kekuasaan dan fasilitas besar, tegasnya, juga memikul tanggung jawab dan amanah besar, yaitu: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa,....." (Pembukaan UUD 1945).

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Pandemi Covid-19 Belum Selesai

Sakinah: Pemerintah Jangan Buka Sekolah Dulu!

“Apakah kita sudah siap dengan segala risiko yang akan timbul, terutama para aset bangsa, anak-anak generasi penerus bangsa yang rentan terpapar dan berpotensi menjadi pembawa virus (carrier) Covid-19

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Komisi X DPR RI

Palu (28/05) — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) berwacana akan membuka sekolah pada bulan Juli mendatang. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Sakinah Al-Jufri langsung merespon wacana yang digulirkan Pemerintah tersebut.

“Pemerintah harus jelas planning pembukaan sekolah, pandemi Covid-19 belum selesai, jangan buka sekolah dulul,” tutur Sakinah di komplek Al-Khairaat Palu, Kamis, (28/05).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan saat ini masih diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) namun pemerin-

tah dengan tergesa-gesa melakukan relaksasai PSBB dan tengah menyiapkan new normal menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19).

“Ini kan masih diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kenapa tiba-tiba sekolah-sekolah, mal-mal dan perkantoran akan dibuka secara keseluruhan tanpa melihat di mana zona merah,” ungkap Sakinah.

Rencana pembukaan sekolah tentunya harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Apakah sekolah dapat menjamin anak-anak yang masih kecil dapat menjaga dirinya selama sehari di kelas

dengan tetap menjaga social distancing, memakai masker dengan benar selama sekolah.

“Apakah kita sudah siap dengan segala risiko yang akan timbul, terutama para aset bangsa, anak-anak generasi penerus bangsa yang rentan terpapar dan berpotensi menjadi pembawa virus (carrier) Covid-19,” ungkap politisi PKS sekaligus Sekjend WIA Pusat.

Selain kesiapan sekolah, pembukaan sekolah juga akan menambah pekerjaan guru. Selain mengajar, guru harus mengontrol dan mengawasi dengan ketat anak didiknya selama belajar di dalam kelas dan memastikan tidak terpapar dan tidak menularkan virus Covid-19 baik di sekolah maupun sesampainya di rumah masing-masing.

“Guru tambah dibebani tugasnya, selain harus mengajar guru dibebani mengawasi dan mengontrol interaksi anak didiknya, ini sangat membebani guru. Jadi pemerintah harus menunda pembukaan sekolah sampai Covid-19 benar-benar selesai,” pungkas Sakinah.



Politisi PKS: Surplus Neraca Perdagangan RI Bukan Prestasi Pemerintah

"Meskipun secara kumulatif neraca perdagangan kita surplus, tapi penyebabnya justru lebih karena mesin perekonomian kita sedang melambat karena dampak pandemi corona. Bukan karena kinerja perdagangan yang moncer, jika tidak cermat membaca data ini bisa jadi kamuflase prestasi"

H. HIDAYATULLAH, S.E

Anggota Komisi XI DPR RI

Medan (16/05) — Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS, Hidayatullah menilai, Neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif sepanjang Januari hingga April 2020 surplus US\$ 2,25 miliar tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Karena sejatinya, kata Hidayatullah, per bulan April 2020 neraca perdagangan mengalami defisit sebesar US\$ 344,7 juta. Defisit April disebabkan nilai impor senilai US\$12,54 miliar lebih besar dibandingkan ekspor US\$12,19 miliar.

"Meskipun secara kumulatif neraca perdagangan kita surplus, tapi penyebabnya justru lebih karena mesin perekono-

mian kita sedang melambat karena dampak pandemi corona. Bukan karena kinerja perdagangan yang moncer, jika tidak cermat membaca data ini bisa jadi kamuflase prestasi". Disampaikan oleh Hidayatullah kepada media pada hari Sabtu (16/05).

Menurutnya surplus tersebut bukan karena bagusnya kinerja pemerintahan, sebab tidak terlihat langkah-langkah strategis pemerintah untuk mengurangi tekanan terhadap ekspor.

Menurut Hidayatullah, selama ini struktur pertumbuhan ekonomi sangat rapuh karena bergantung pada kekuatan

konsumsi rumah tangga.

"Pemerintah menyadari besarnya penduduk Indonesia adalah potensi, tetapi kenyataannya kita hanya menjadi pasar barang-barang impor saja," kata legislator PKS ini.

Hidayatullah menjelaskan situasi pandemi virus corona ini menjadi gambaran sempurna rapuhnya ekonomi Indonesia akibat ketergantungan konsumsi rumah tangga.

"Begitu terjadi pembatasan sosial, daya beli masyarakat turun yang juga berimbas terhantamnya ekonomi pada dua sisi baik permintaan atau penawaran hingga berujung PHK dimanmana" ujarnya.

Hidayatullah berpesan kedepannya pemerintah agar fokus menyelesaikan persoalan daya saing investasi di Indonesia.

"Selama ini pemerintah lamban dalam memperbaiki iklim investasi di Indonesia, hingga kalah saing dengan negara-negara tetangga," pungkas Hidayatullah.



Wacana Pelonggaran PSBB,

Junaidi Auly: Kebijakan Panik Pemerintah

Wacana relaksasi PSBB oleh pemerintah pusat disinyalir terkait dengan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan realisasi angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tersebut jauh dari prediksi pemerintah

Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (19/05) — Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS, Junaidi Auly mempertanyakan alasan pemerintah pusat mewacanakan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disaat kasus positif covid-19 belum benar-benar turun drastis.

Menurutnya wacana relaksasi PSBB oleh pemerintah pusat disinyalir terkait dengan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan realisasi angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tersebut jauh dari prediksi pemerintah.

"Saat itu menkeu masih yakin tumbuh di angka 4,5 persen, nyatanya terkontraksi 2,41 persen secara kuartalan, artinya pertumbuhan anjlok dan hanya tumbuh 2,97 persen saja," kata Junaidi di sela-sela Resesnya di Lampung (19/05/2020).

Legislator PKS ini menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah menyadari sejak awal sehingga tidak panik. Karena menurutnya pemerintah selama ini lambat dalam memperbaiki iklim investasi di Indonesia, sehingga ekonomi terus bertopang pada konsumsi rumah

taglia.

"Begitu daya beli jatuh, konsumsi terpengang yang ber efek berkurangnya permintaan barang dan jasa, PHK pun meningkat akibat industri terdampak," kata Junaidi.

Paniknya pemerintah dalam penanganan virus corona tercermin dalam bongkar pasang beberapa kebijakan, misalnya terkait larangan mudik, buka tutup bandara, pembatasan usia bekerja, wacana relaksasi PSBB.

"Masyarakat menjadi bingung dengan pernyataan para pejabat yang tidak sinkron satu sama lainnya," kata Junaidi.

Wacana relaksasi PSBB setelah memburuknya indikator ekonomi makro Indonesia disayangkan oleh Junaidi karena mencerminkan ketidaksabaran pemerintah dalam penanganan pandemi corona. Menurut aleg asal Lampung ini pemerintah harus jernih berpikir.

"Selama pemerintah tidak tegas dan inkonsisten dalam menyelesaikan permasalahan darurat kesehatan ini, maka memperbaiki ekonomi pun akan



Terkait Gagal Bayar Asuransi WanaArtha

Mau Untung Cepat Tapi Korbankan Nasabah, OJK Diam Saja

pemblokiran 800 rekening bukan hal sepele, karena akan berdampak besar pada pasar. Salah satunya ialah terganggunya proses likuiditas asuransi dalam hal pencairan klaim nasabah. Pasar kan tidak boleh terkonstraksi oleh sebuah policy. Jangan sampai yang tidak mempunyai kaitan dengan Jiwasraya, terkena dampaknya juga

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (21/05) — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mempertanyakan kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kejaksaan yang cenderung acuh terhadap nasib nasabah. Menurut dia, dua lembaga itu harus bergerak cepat agar pemblokiran tidak berlangsung lama.

"Padahal OJK sudah berjanji paling lambat akhir Februari blokir ini akan dibuka dan Kejagung sudah dapat memutuskan status rekening efek yang diblokir tersebut, tapi mana?" kata Anis saat dihubungi Law-justice.co pada Kamis (14/5/2020).

Dia mengatakan,

pemblokiran 800 rekening bukan hal sepele, karena akan berdampak besar pada pasar. Salah satunya ialah terganggunya proses likuiditas asuransi dalam hal pencairan klaim nasabah.

"Pasar kan tidak boleh terkonstraksi oleh sebuah policy. Jangan sampai yang tidak mempunyai kaitan dengan Jiwasraya, terkena dampaknya juga," ujar Anis.

Anis menyarankan agar perusahaan WanaArtha memprioritaskan kepentingan nasabah dengan melakukan penalangan dana dari pemilih. "Sebaiknya nasabah diprioritaskan dulu, sementara kami akan dorong OJK untuk menyelesaikan proses verifikasi rekening yang diblokir itu," jelas Anis.

la menegaskan, perusahaan asuransi tidak boleh berharap pada bantuan relaksasi COVID-19 dari pemerintah untuk bayar klaim



asuransi. Anis ragu dana segar Rp 405 triliun dari pemerintah, yang tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020, akan dialokasikan kepada perusahaan asuransi, apalagi yang diduga terlibat dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

"Saya ragukan hal itu, karena alokasinya kan sudah

ditetapkan ke mana saja alirannya. Dari Rp 405,1 triliun anggaran ini, dana alokasi untuk sektor kesehatan Rp 75 triliun, perlindungan sosial Rp 110 triliun, insentif perpajakan Rp 70,1 triliun, dan bantuan kepada dunia usaha Rp 150 triliun. Tidak ada untuk Jiwasraya," jelasnya.

Banyak Kesalahan Mendasar Dalam Teknik Penyusunan UU di RUU Omnibus Law. DPR : Fatal !

“Pemerintah selaku pengusul RUU ini tidak boleh mengecoh publik. Meskipun berniat baik, penyusunan RUU ini harus dilakukan secara jujur dan transparan baik secara judul dan isi. Sebab, dampaknya akan dirasakan bagi masyarakat”

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Jakarta (16/05) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, mengungkapkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki ambiguitas jika dikorelasikan antara judul dan substansi.

Bukhori menjelaskan bahwa setelah dilakukan pencermatan oleh internal Fraksi PKS di DPR, sebagian besar pasal-pasal yang termaktub dalam Omnibus Law, secara substansi, cenderung mencerminkan kemudahan berusaha bagi pemodal, bukan pada penciptaan lapangan kerja sebagaimana termaktub dalam judul RUU tersebut.

“Kami memandang RUU ini agak “tricky”. Sebab, jika dikaitkan antara judul dan

substansi yang telah kami telaah sejak draft RUU ini kami terima di Baleg, kami menemukan bahwa sebagian besar pasal-pasal yang diubah atau dihapus justru cenderung memberikan karpet merah bagi pengusaha besar, misalnya berbagai kemudahan berusaha dan penyederhanaan perizinan. Sehingga dalam peribahasa, RUU ini seperti jauh panggang dari api (tindakan tidak sesuai dengan maksud)” ungkap Bukhori di Jakarta, Jumat (15/05/2020)

Dalam kesempatan tersebut Bukhori turut memaparkan, secara keseluruhan sebagian besar pengaturan dalam RUU ini, yakni sebanyak 801 pasal

memuat ketentuan terkait kemudahan berusaha dan penyederhanaan perizinan. Menurutnya, fakta yuridis tersebut bertentangan dengan UU No 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa judul undang-undang harus merefleksikan isi pembahasan.

Pada bagian Lampiran II Undang-Undang RI No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Teknik Penyusunan Perundang-undangan Bab I, Kerangka Peraturan Perundang-Undangan huruf (A) No. 3 berbunyi:

“Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang- undangan.”

Lebih lanjut, Bukhori turut mempersoalkan RUU Cipta Kerja yang memiliki masalah secara maknawi. Kata “Cipta”, menurutnya, jika mengacu pada KBBI berarti angan-angan yang kreatif.

“Padanan kata yang digunakan sebagai judul RUU ini saja sudah bermasalah. “Cipta”



berarti angan-angan, sebuah utopia. Sehingga, saya justru membayangkan upaya menciptakan lapangan kerja melalui RUU ini sekadar khayalan. Sebab semangat tersebut ternegasikan oleh materi substansi yang didominasi oleh pasal-pasal yang memanjakan kepentingan pengusaha,” cetus Bukhori Politisi PKS ini menganjurkan agar judul RUU ini disesuaikan dengan isi dan benchmarking dengan Omnibus

Law di beberapa negara. Misalnya Filipina memiliki The Omnibus Investment Code, Amerika Serikat memiliki The Omnibus Public Land.

“Pemerintah selaku pengusul RUU ini tidak boleh mengecoh publik. Meskipun berniat baik, penyusunan RUU ini harus dilakukan secara jujur dan transparan baik secara judul dan isi. Sebab, dampaknya akan dirasakan bagi masyarakat” pungkas Anggota Komisi VIII DPR ini.

Anggota Baleg Pertanyakan Makna Penyederhanaan dan Percepatan RUU Cipta Kerja

Banyaknya amanah pembentukan peraturan pelaksana menunjukkan bahwa semangat penyederhanaan, memutus rantai birokrasi, menghilangkan tumpang tindih peraturan dan semangat percepatan dalam RUU ini tidak nampak. Bukan hanya puluhan bahkan ratusan amanah peraturan pelaksana muncul di RUU ini, baik dalam bentuk amanah pembentukan PP, Perpres hingga Perda,”

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Jakarta (19/05) — RUU Omnibus Law yang telah masuk ke pembahasan di Badan Legislasi terus memunculkan kritisi. Salah satunya dari anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah yang mempertanyakan di mana letak makna penyederhanaan dan percepatan RUU Cipta Kerja, setelah melihat begitu banyak pasal dalam RUU ini yang

memberi amanah pembentukan peraturan turunan.

Ledia menjabarkan kembali bahwa tujuan mendasar RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam draft RUU dan Naskah Akademik adalah semangat untuk memenuhi hak kesejahteraan bagi warga negara Indonesia dengan membuka peluang kerja seluas-luasnya

bagi tenaga kerja Indonesia dan sekaligus untuk menggairahkan iklim investasi di negeri ini.

Kedua hal tersebut diyakinkan akan mampu terwujud lebih baik bila ada kemudahan dan penyederhanaan pada regulasi yang saat ini tersebar pada hampir 80 jenis Undang-Undang sektoral yang berdiri sendiri. Melakukan revisi Undang-Undang secara terpisah tentu memakan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat besar, sehingga metode omnibuslaw pun dipilih demi mendapat dua hal mendasar dari satu perubahan besar dalam sistem peraturan perundangan di negeri ini, yaitu Penyederhanaan dan Percepatan.

Namun, sayang, kata Ledia, pada kenyataannya naskah RUU ini justru menunjukkan semangat yang bertolak belakang.

“Banyaknya amanah pembentukan peraturan pelaksana menunjukkan bahwa semangat penyederhanaan, memutus rantai birokrasi, menghilangkan tumpang tindih peraturan dan semangat percepatan dalam



RUU ini tidak nampak. Bukan hanya puluhan bahkan ratusan amanah peraturan pelaksana muncul di RUU ini, baik dalam bentuk amanah pembentukan PP, Perpres hingga Perda,” ungkapnya.

Sekretaris Fraksi PKS ini kemudian mengingatkan bahwa selama ini ratusan Undang-Undang yang sudah disahkan di negeri ini seringkali terhambat implementasinya karena lambat dan tak kunjung hadirnya peraturan pelaksana yang menjadi amanah Undang-Undang.

Ledia lantas memberi contoh UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang disahkan tahun 2014 tetapi membutuhkan waktu

lima tahun untuk bisa diimplementasikan karena peraturan pelaksanaanya baru keluar pada 2019 lalu.

Begitu pula Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas yang telah disahkan sejak tahun 2016 dan mengamanahkan 15 peraturan pelaksana namun hingga saat ini baru menghasilkan 2 PP saja terkait Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta PP terkait Akomodasi yang Layak.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

SELAMATKAN!

HALUAN IDEOLOGI PANCASILA CANTUMKAN TAP MPRS No XXV/1966.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Keanehan RUU HIP

Ini aneh, ada Tujuh TAP MPR yang dijadikan dasar hukum pembentukan RUU HIP, padahal tak terkait langsung dengan ideologi Pancasila, tetapi ada TAP MPR yang sangat terkait dan menjaga ideologi Pancasila dari ideologi yang merongrongnya, yaitu komunisme, malah tidak dimasukkan

Hidayat Nur Wahid | Wakil Ketua MPR RI



Jangan abaikan bahaya laten komunisme

Jangan abaikan bahaya laten komunisme, TAP MPRS XXV/1966 secara resmi masih berlaku karena bahayanya mengancam bangsa Indonesia sampai dengan saat ini. TAP MPRS tersebut dalam hierarki perundang-undangan berada di atas UU dan di bawah UUD, jadi sudah semestinya menjadi rujukan,"

Jazuli Juwaini | Ketua Fraksi PKS DPR RI



Pancasila bertentangan dengan Ideologi Komunisme

PKS menilai Tap MPRS No. 25/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia wajib dimasukkan pada bagian konsideran atau "mengingat". Hal ini sebagai penegasan bahwa bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara dan menentang nilai-nilai komunisme

Mulyanto | Anggota Badan Legislasi DPR RI



TAP MPRS itu Ruh Ideologi Pancasila

Sejarah telah membuktikan bahwa ada pihak-pihak atau golongan yang ingin mengubah ideologi negara kita menjadi ideologi terlarang, sehingga menurut kami ketentuan tentang TAP MPRS itu selama masih hidup dan dinyatakan berlaku mutlak harus dimasukkan dalam ketentuan mengingat dari RUU Haluan Ideologi Pancasila karena hal ini adalah esensi penting dan ruh dari ideologi negara melalui Ideologi Pancasila.

Bukhori Yusuf | Anggota Badan Legislasi DPR RI

Mulyanto: Tolak RUU Ciptaker Karena Samakan Umroh yang Dapat Dikelola Siapa Saja

"Memberikan kemudahan bagi pengusaha umroh dalam bentuk perizinan yang lebih sederhana, cepat dan murah tentu sangat dinantikan. Namun syarat agama Islam bagi pengusaha dan pengelola perjalanan ibadah umroh harus tetap dipertahankan,"

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Tangerang Selatan (18/05) — Salah satu bagian yang dikritisi Fraksi PKS di DPR RI terhadap RUU Ciptaker adalah penghilangan syarat kewajiban beragama Islam kepada pemilik perusahaan yang ingin menyelenggarakan usaha umroh.

Bagi PKS penghilangan syarat ini sangat riskan mengingat umroh merupakan salah satu ibadah umat Islam yang setiap tahunnya diatur dalam ketentuan agama.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menyebutkan dalam setiap penyelenggaraan umroh ada

bimbingan dan pendampingan kepada calon jamaah berdasarkan syarat Islam. Dan ini hanya dapat dilakukan oleh umat Islam sendiri, bukan oleh orang yang beragama di luar Islam.

PKS khawatir jika umroh dikelola oleh perusahaan yang bukan dimiliki orang Islam akan menghilangkan substansi ibadah umroh dan hanya menyamakan umroh dengan perjalanan wisata biasa.

"Sulit membayangkan bagaimana rasanya melaksanakan umroh yang dikelola bukan oleh orang Islam. Substansi ibadah umroh sama seperti haji yaitu meneguhkan tauhid,

hanya mengakui Allah sebagai Tuhan sekaligus menolak apapun atau siapapun untuk disembah. Lalu, apakah negara dapat menjamin orang beragama di luar Islam bisa mengajarkan masalah prinsip seperti itu secara lugas meskipun bertentangan dengan keyakinan mereka?" tegas Mulyanto.

Mulyanto minta Pemerintah jangan mencampurkan masalah ibadah dengan kepentingan bisnis. Biarkan urusan ibadah orang Islam diselenggarakan oleh orang Islam sendiri.

Faktanya, hingga saat ini Indonesia tidak kekurangan jumlah penyelenggara umroh. Sehingga tidak ada alasan mendesak bagi Pemerintah untuk memberi izin untuk menyelenggarakan ibadah umat Islam.

Mulyanto meminta Pemerintah sebaiknya tetap menggunakan Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Menurut Mulyanto UU tersebut sudah cukup baik mengatur penyelenggaraan haji



dan umroh, termasuk soal perizinan usaha.

Di Pasal 89, UU 8/2019 untuk bisa mendapatkan Perizinan Berusaha menjadi PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Salah satunya adalah dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Ketentuan ini, menurut Mulyanto, pasti sudah dikaji dan dibahas secara mendalam sebelum diputuskan. Sehingga kalau dihapuskan dan diganti dengan ketentuan baru sebagaimana diatur dalam RUU Omnibus Ciptaker akan mengundang

perdebatan panjang lagi.

"Memberikan kemudahan bagi pengusaha umroh dalam bentuk perizinan yang lebih sederhana, cepat dan murah tentu sangat dinantikan. Namun syarat agama Islam bagi pengusaha dan pengelola perjalanan ibadah umroh harus tetap dipertahankan," tandas

Pemerintah, kata Mulyanto, harusnya faham bahwa bagi kaum muslimin umroh itu adalah ibadah buka perjalanan wisata biasa. Syarat di atas penting untuk memberikan rasa aman dan keyakinan bagi kaum muslimin dalam menjalankan ibadah mereka.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Anggota Fraksi PKS Minta Menkeu Bertanggung Jawab Atas Krisis Keuangan Negara

Defisit anggaran hingga 6,72 persen mengindikasikan Pemerintah gagal menyusun APBN pada masa covid-19. Padahal Pemerintah telah melakukan tiga kali refocusing dan relokasi anggaran dengan prinsip pemotongan dan penghematan. Pemotongan dan penghematan anggaran telah dilakukan, mengapa kok masih defisit juga?

Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Badan Anggaran DPR RI

Padang (19/05) — Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto mengatakan, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, harus bertanggung jawab atas krisis keuangan akibat diberlakukannya Perppu No. 1/2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseasee

2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

"Bila tidak lagi mampu mengatur keuangan negara, Sri Mulyani lebih baik mundur saja dari jabatan Menteri Keuangan," papar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Hermanto juga

menanggapi pernyataan Sri Mulyani yang menyebutkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 bakal melebar hingga 6,72 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau mencapai Rp. 1.028,6 triliun.

Menurutnya, defisit anggaran hingga 6,72 persen mengindikasikan Pemerintah gagal menyusun APBN pada masa covid-19. Padahal Pemerintah telah melakukan tiga kali refocusing dan relokasi anggaran dengan prinsip pemotongan dan penghematan.

"Pemotongan dan penghematan anggaran telah dilakukan, mengapa kok masih defisit juga?", tanya legislator dari FPKS ini.

Hal tersebut, lanjutnya, menandakan Pemerintah gagal menterjemahkan dan menjabarkan amanat yang terkandung dalam UU Nomor 2/2020.

"Lalu pertanyaan yang mendasar adalah darimana sumber dana untuk menutupi



defisit tersebut?", tanyanya lagi.

Hermanto memprediksi, defisit 6,72 persen akan menjadi sumber krisis keuangan dan ekonomi nasional yang dapat menghadirkan krisis multidimensional.

"Pemerintah harus mewaspadai akan munculnya krisis sosial karena belum teratasinya wabah covid-19. Krisis sosial dapat berdampak

pada krisis politik", ucapnya.

Namun Hermanto berharap krisis multidimensional tidak terjadi. Hal tersebut bisa diusahakan sepanjang Pemerintah terbuka dan demokratis dalam menyusun APBN.

"Menerapkan prinsip good governance, menegakkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia", pungkask legislator dari dapil Sumbang 1 ini.

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Amin Distribusikan Paket Sembako dan APD Di Jember & Lumajang

“Sesuai amanat UU, kami ingin memastikan bahwa CSR BUMN juga berperan dalam membantu mengurangi dampak serta peyebaran dari wabah virus corona, dan disalurkan tepat sasaran”

AMIN AK,M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI

Lumajang (18/05) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Jawa Timur IV, Amin Ak kembali mendistribusikan 7.700 paket sembako untuk membantu masyarakat di tengah wabah virus Corona di Jember dan Lumajang, Minggu (17/05/2020).

Selain untuk masyarakat tidak mampu, Amin juga menyalurkan sembako untuk panti asuhan dan pondok pesantren yang membutuhkan. Paket sembako terdiri dari 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, dan 1 liter gula pasir.

Amin juga membagikan paket alat pelindung diri (APD) lengkap yang di salurkan ke berbagai instansi yang membutuhkan mulai dari puskesmas, klinik, hingga

rumah sakit.

Beberapa rumah sakit yang menerima bantuan antara lain RS Islam Lumajang, RS Wijaya Kusuma Lumajang, Puskesmas Ambulu Jember, Puskesmas Wuluhan Jember dan serta sejumlah instansi lainnya di wilayah Jember dan Lumajang.

Penyaluran paket sembako dan APD kali, selain dari dana pribadi, Amin juga bekerjasama dengan Pertamina yang merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN.

Anggota Fraksi PKS DPR RI itu mengaku memfasilitasi penyaluran sembako dan APD kepada masyarakat yang membutuhkan di Dapilnya.

“Sesuai amanat UU, kami ingin memastikan bahwa CSR

BUMN juga berperan dalam membantu mengurangi dampak serta peyebaran dari wabah virus corona, dan disalurkan tepat sasaran,” katanya.

Anggota Komisi VI DPR RI itu mengaku prihatin dengan tren angka positif Covid-19 di Jawa Timur yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Hal itu membuat kondisi ekonomi masyarakat terus terdampak selama tiga bulan terakhir akibat pandemi.

“Saya menghimbau, bagi masyarakat yang terpaksa masih beraktivitas di luar rumah untuk menghindari kerumunan, terutama di tempat-tempat publik seperti pasar, terminal, stasiun, dan Bandara. Amin juga meminta masyarakat Jatim yang berada di Jabodetabek untuk tidak mudik agar penyebaran wabah bisa ditekan semaksimal mungkin. Data menunjukkan, tingginya arus manusia dari Jabodetabek ke berbagai kota lain dibanding lurus dengan tingginya kenaikan angka positif Covid-19 di kota tujuan,” beber Amin.



Peduli Masyarakat Terdampak Covid-19

Nurhasan Zaidi Salurkan Paket Sembako

“Pandemi Covid 19 cukup berimbas bagi ekonomi masyarakat. Daya beli mereka menurun, banyak yang kehilangan mata pencaharian, cukup rentan menambah angka kemiskinan. Untuk itu kita dorong seluruh pihak untuk bahu membahu, satukan langkah tingkatkan kepedulian”

H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IX

Majalengka (18/05) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi, mendorong semua pihak untuk saling peduli dan bahu membahu dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Hal tersebut disampaikan pada acara simbolisasi penyaluran paket sembako untuk masyarakat di Gedung Bapermin, Majalengka, minggu (17/05/2020).

“Pandemi Covid 19 cukup berimbas bagi ekonomi masyarakat. Daya beli mereka menurun, banyak yang kehilangan

mata pencaharian, cukup rentan menambah angka kemiskinan. Untuk itu kita dorong seluruh pihak untuk bahu membahu, satukan langkah tingkatkan kepedulian”, ujar Nurhasan.

Dalam kesempatan tersebut Nurhasan menyerahkan secara simbolik bantuan sosial berupa lebih dari 5000 paket sembako yang disisihkan dari gajinya maupun yang dihimpun dari berbagai program mitra kerjanya di komisi VIII, baik kementerian maupun lembaga, untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak di daerah Subang, Sumedang

dan Majalengka.

Selain bantuan sembako, Nurhasan juga telah menyalurkan 10.000 masker bagi masyarakat dan menyumbangkan APD bagi tenaga medis di beberapa rumah sakit.

“Ini adalah bentuk aksi advokasi, pengawasan serta kepedulian kita untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, karena kita semua tahu bahwa DTKS sebagai acuan pemberian bansos masih terus di verifikasi dan datanya belum sempurna, sehingga tidak sepenuhnya dapat meng-cover dan menyentuh masyarakat terdampak”, ungkapnya.

Dalam sambutannya Nurhasan juga memberikan apresiasi kepada dinas sosial dan kemensos yang cukup sigap merespon pengajuan nama penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat rentan yang belum masuk ke dalam DTKS penerima bansos Sembako maupun PKH.

“Tercatat sekitar 20.500 keluarga terdampak yang diajukan oleh dinas sosial dan di dampingi oleh kita (anggota DPR.red) telah ditetapkan



sebagai penerima BST oleh kemensos untuk mendapatkan bantuan senilai 600.000 rupiah setiap selama 3 bulan. Alhamdulillah sebagian besar BST sudah terdistribusikan dan sudah diterima masyarakat penerima manfaat, inilah pentingnya kita berkoordinasi dan berkolaborasi, semoga dapat meringankan beban masyarakat”, ujarnya.

Terkait perkiraan meningkatnya angka kemiskinan sebesar 12,37% atau bertambah 8,5 juta orang pasca Covid-19, Politisi Fraksi PKS ini mengungkapkan keprihatinan dan kekekhawatirannya.

“Kita cukup prihatin bahwa saat ini atau bahkan mungkin kedepannya angka kemiskinan terus akan bertambah, sedang

skema jaring pengaman sosial untuk Covid-19 hanya disiapkan untuk masa 3 bulan dan belum ada prediksi yang akurat sampai kapan kondisi ini akan berakhir,” ungkapnya.

Disinilah menurutnya, mengapa pembenahan dan perbaikan DTKS harus menjadi prioritas dan perlu dilakukan secara simultan bersamaan dengan penyerahan bansos.

“Pembenahan DTKS menjadi prioritas dan disaat yang sama, kita juga minta Kemensos untuk menyiapkan skema perlindungan sosial yang matang pasca Covid-19 dan bila DTKS sudah lebih rapi maka ini akan sangat membantu,” pungkasnya.

Mahfudz Abdurrahman Serahkan Paket Sembako di Daerah Pemilihan

“Sebagai bentuk kepedulian anak bangsa untuk saling bahu membahu dalam meringankan beban warga, khususnya terdampak Covid-19 ini kami serahkan bantuan paket sembako untuk warga di daerah pemilihan saya, semoga bisa bermanfaat, apalagi ini mau menghadapi Hari Raya Idul Fitri”

H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

Bekasi (19/05) — Di tengah masih merebaknya Covid-19 dan banyaknya masyarakat terdampak, menjadi keprihatinan Mahfudz Abdurrahman untuk terus berusaha meringankan beban masyarakat khususnya di daerah Pemilihannya, Kota Bekasi dan Kota Depok.

Setelah memberikan 5 ton beras, paket jahe merah dan masker untuk warga terdampak Covid-19, juga APD untuk para tenaga medis, kini Mahfudz

Abdurrahman menyerahkan 5000 paket sembako kepada warga terdampak Covid-19 secara merata masing-masing 2500 untuk Kota Bekasi dan Kota Depok, Jawa Barat, Selasa, (19/05).

Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VI ini mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat yang terdampak akibat masih mewabahnya virus Corona sampai saat ini.

Menurut pria yang akrab

disapa Mahfuzdi, penyerahan paket sembako adalah bentuk komitmen dirinya sebagai anak bangsa untuk terus berusaha saling bahu membahu dalam meringankan beban warga dan menangani percepatan virus covid-19.

“Sebagai bentuk kepedulian anak bangsa untuk saling bahu membahu dalam meringankan beban warga, khususnya terdampak Covid-19 ini kami serahkan bantuan paket sembako untuk warga di daerah pemilihan saya, semoga bisa bermanfaat, apalagi ini mau menghadapi Hari Raya Idul Fitri” ungkap Mahfuzdi

Selanjutnya Mahfudz Abdurrahman menambahkan bahwa bantuan paket sembako yang diserahkan secara simbolik kali ini merupakan kerjasama dengan Satgas BUMN penanggulangan bencana Covid-19 yakni PT. Telkom, Tbk. Hal ini merupakan aspirasi dirinya sebagai Anggota DPR RI Komisi 6 yang bermitra dengan Kementerian BUMN.

“Insya Allah, bantuan ini



selanjutnya segera kita serahkan secara simbolik kepada perwakilan masing-masing warga kecamatan untuk kemudian disalurkan langsung ke warga terdampak Covid-19. Penyaluran juga dibantu LAZ Ucare Indonesia di Kota Bekasi dan LAZ Zakat Sukses di Kota Depok serta dibantu Tim relawan Mahfuzdi yang ada di Kota Bekasi dan Kota Depok," katanya kepada media.

Turut hadir pada acara

tersebut, Satgas BUMN, selaku mitra kerja Anggota DPR RI komisi VI Mahfudz Abdurrahman, diantaranya Amin Ari perwakilan PT. Telkom, Tbk, dari Bank Tabungan Negara (BTN), Sujud, juga dihadiri Heri Koeswara selaku Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat Dapil 8 dan disaksikan oleh beberapa tokoh masyarakat.

Peduli di Bulan Suci

Anis Byarwati Berbagi Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19

Kondisi pandemik ini terasa berat untuk kita semua. Dengan berbagi seperti ini, kita bisa saling menguatkan dengan sesama anak bangsa.

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta |

Jakarta (19/05) — Pandemi Covid-19 merupakan ujian besar bagi dunia, tak terkecuali bangsa kita. Dampak kesehatan, sosial dan ekonomi dirasakan betul oleh masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah. Korban dari penyebaran virus ini terus meningkat.

Selain korban terdampak langsung secara kesehatan, korban yang terdampak tidak langsung jauh lebih banyak.

Korban terdampak tidak langsung terutama dari sisi ekonomi. Kelompok rentan dengan penghasilan harian yang dimasa PSBB kehilangan mata pencaharian, menjadikan kelompok warga miskin melonjak tajam.

Menyikapi situasi pandemik, anggota Komisi XI

DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, ikut turun tangan membantu masyarakat terdampak pandemik covid-19.

Sebagaimana instruksi fraksi PKS, Anis menyampaikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan bahan pangan pokok, serta bantuan alat kesehatan, APD dan berbagai kebutuhan medis kepada tenaga kesehatan, serta pembagian masker untuk masyarakat.

"Kondisi pandemik ini terasa berat untuk kita semua. Dengan berbagi seperti ini, kita bisa saling menguatkan dengan sesama anak bangsa," ujarnya.

Anis menambahkan, spirit Ramadhan yang sedang kita jalani hendaknya kita manfaatkan untuk meningkatkan kepedulian kita

untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan.

Hingga (18/05/2020) pukul 20.00 WIB, Anggota DPR RI Dapil Jakarta Timur telah menyerahkan bantuan berupa 2.795 paket sembako yang dibagikan dalam lima tahap, 2.450 pcs masker kain untuk masyarakat, 2.500 pcs masker medis untuk tenaga kesehatan, 25 galon dan 500 botol hand sanitizer, 15 Galon disinfektan, 5 Buah penyemprot disinfektan, 261 paket bingkisan lebaran, 302 juta rupiah bantuan tunai dan donasi buka puasa sebesar 5.5 juta rupiah.

Anis menegaskan bahwa gerakan bantuan kemanusiaan yang disalurkan melalui para relawan ini, akan terus hadir selama pandemik masih menghantui warga.

"Agar masyarakat tidak merasa sendiri menghadapi situasi berat ini," tambahnya.

Ia menegaskan bahwa tugas sebagai wakil rakyat adalah berjalan bersama rakyat dan memberikan pembelaan terhadap masyarakat yang membutuhkan.



Ramadan Bulan Berbagi

Iskan Serahkan Paket Sembako ke 10 Kabupaten/ Kota Terdampak Covid-19

Pembagian paket sembako yang dilakukan bersama pengurus daerah PKS ini dikhususkan bagi masyarakat yang memang betul-betul kurang mampu dan sangat membutuhkan. akibat dari dampak sosial yang ditimbulkan oleh virus Corona. Ini butuh kepedulian kami akibat dampak sosial yang ditimbulkan oleh pandemi Corona

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (19/05) — Anggota komisi VIII DPR RI Fraksi PKS dari daerah pemilihan Sumatera utara II, Iskan Qolba Lubis kembali menyerahkan 1000 paket sembako yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera utara.

10 Kabupaten) Kota yang dimaksud adalah Labuhanbatu utara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Padang lawas utara, Padang Lawas, Padangsidim-

puan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Tengah.

Beberapa waktu yang lalu, politisi PkS ini juga turut menyumbangkan ratusan paket APD di seluruh puskesmas dan rumah sakit yang tersebar di 5 kabupaten/kota.

Iskan menyampaikan Bantuan ini bertujuan dalam rangka upaya meringankan kesulitan masyarakat yang terdampak

ditengah wabah Covid 19.

"Dampak dari Covid-19 berimbas kepada masyarakat, Akibatnya mata pencarian mereka tidak lagi seperti biasanya. Aksi sosial ini bisa juga dikatakan dengan berbagi sesama di bulan Ramadhan yang penuh berkah," ungkapnya.

Menurut Anggota DPR RI Iskan Qolba, gerakan sosial pengurus daerah PKS ini adalah wujud kepeduliannya sebagai wakil rakyat.

"Pembagian paket sembako yang dilakukan bersama pengurus daerah PKS ini dikhususkan bagi masyarakat yang memang betul-betul kurang mampu dan sangat membutuhkan. akibat dari dampak sosial yang ditimbulkan oleh virus Corona. Ini bentuk kepedulian kami akibat dampak sosial yang ditimbulkan oleh pandemi Corona," jelas Iskan.

Terkait perkiraan meningkatnya angka kemiskinan sebesar 12,37% atau bertambah 8,5 juta orang pasca Covid-19,



Politisi Kelahiran Sibuhuan ini mengutarakan keprihatinan dan kekekhawatirannya.

"Saya khawatir angka kemiskinan ini akan terus bertambah, walaupun kita tahu skema jaring pengaman sosial untuk Covid-19 hanya disiapkan untuk masa 3 bulan dan wabah ini belum ada prediksi yang akurat sampai kapan kondisi ini akan berakhir" pungkasnya.

Iskan juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah agar menjalankan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), menggunakan masker serta menghindari keramaian.

Metode distribusi bantuan sembako ini dengan cara door

to door ke rumah warga sambil membagikan sembako untuk masyarakat yang membutuhkan karena terdampak Covid-19.

Di lain sisi, iskan juga mengajak seluruh elemen masyarakat, baik dinas pemerintah terkait dan anggota dewan lainnya agar saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam membantu mengurangi penderitaan masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

"Apa yang kita lakukan ini diharapkan bisa diikuti elemen masyarakat mampu dan anggota Dewan lainnya, dan kami juga berharap penularan virus Corona ini dapat segera ditanggulangi dalam waktu dekat," tutupnya.

Dukung PSBB, Aleg PKS Beri Bantuan Paket Sembako Warga Miskin

Alhamdulillah PKS terus komitmen berkhidmat untuk rakyat. Dibuktikan dengan mendukung segala upaya pencegahan penyebaran virus corona ditengah masyarakat. Sekaligus membantu dampak ekonomi terhadap warga miskin. Kami menyiapkan 4.700 paket sembako yang akan segera dibagikan di Kota Garut dan Ko/Kab. Tasikmalaya”

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Fraksi PKS DPR RI Jawa Barat XI

Tasikmalaya (19/05) — Menghadapi dampak ekonomi akibat pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Garut dan Ko/ Kab. Tasikmalaya maka seluruh Anggota Legislatif asal Partai Keadilan Sejahtera dari tingkat pusat hingga daerah menyiapkan 5.000 paket sembako.

Bantuan paket sembako ini diberikan kepada warga miskin yang ekonominya semakin memburuk sejak

wabah Covid-19.

“Alhamdulillah PKS terus komitmen berkhidmat untuk rakyat. Dibuktikan dengan mendukung segala upaya pencegahan penyebaran virus corona ditengah masyarakat. Sekaligus membantu dampak ekonomi terhadap warga miskin. Kami menyiapkan 4.700 paket sembako yang akan segera dibagikan di Kota Garut dan Ko/Kab. Tasikmalaya”, ungkap Toriq.

Anggota Komisi I DPR RI asal FPKS ini mengungkapkan bahwa semenjak PSBB diberlakukan di Kota Garut dan Ko/ Kab. Tasikmalaya pada awal Mei lalu, diyakini akan mempengaruhi roda perekonomian. Sektor bisnis dipastikan akan terdampak, terutama yang bergerak pada kebutuhan publik seperti yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB. Terutama pada kebutuhan utama rakyat yakni ketersediaan kebutuhan Pangan.

“Imbas pemberlakuan PSBB di Kota Garut dan Ko/ Kab. Tasikmalaya, sebagian besar warga miskin yang berusaha di sektor non formal sulit mendapatkan penghasilan. Kalau mereka tidak berpenghasilan lalu bagaimana mereka memberi makan untuk keluarganya. Oleh sebab itu bantuan PKS ini diharapkan dapat menghindari terjadinya kelaparan di tengah warga miskin saat pemberlakuan PSBB”, jelasnya.

Pemberlakuan PSBB Kota



Tasikmalaya yang berlangsung sejak 6-19 Mei 2020 sempat mampu menahan laju penambahan warga yang positif di awal penerapannya. Namun menjelang berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Selasa (19 Mei 2020), kenaikan kasus positif Covid-19 kembali terjadi di Kota Tasikmalaya. Terdapat penambahan empat warga positif yang menjalani perawatan.

“Paling tidak pemberlakuan PSBB memberikan dampak yang signifikan dalam upaya memutus rantai penyebaran

virus. Angka penambahan yang hanya 1 digit menunjukkan bahwa tidak terjadi penyebaran yang masif. Semoga kondisi ini tetap bisa bertahan. PSBB dilakukan untuk keselamatan kita semua. Mari kita dukung dengan modal utama adalah kesadaran masyarakat secara kolektif. Bergotong royong saling membantu”, harap Toriq.

Kunci keberhasilan PSBB adalah kesadaran bersama seluruh masyarakat untuk mematuhi semua yang terkait dengan pembatasan-pembatasan selama pelaksanaan PSBB.

Peduli Covid-19 di Masa Reses bulan Ramadhan

Andi Akmal Bagikan Paket APD dan Takjil

Kami sebagai kader bersyukur bahwa Anggota DPR RI dari PKS dari Sulsel 2 memberikan perhatian penuh terhadap wilayah yang menjadi dapilnya dalam penanganan Covid-19, dan kepada pihak RS semoga ini dapat bermanfaat dan bisa membantu dalam kegiatan penanganan Covid-19,

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

Kabupaten Bone (16/05) — Upaya Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin untuk memerangi penyebaran virus Corona (Covid-19), terus digalakkan.

Melalui timnya, Andi Akmal menyalurkan bantuan APD ke RS Salewang Maros dan Baznaz Maros, Jumat (15/05/2020). Ada 16 paket APD diberikan, berisikan masker, hand sanitizer, dan disinfektan. Penyerahan diwakili langsung melalui Ketua DPD PKS Kartomas.

Menurutnya, bantuan ini adalah bagian upaya untuk membantu para tenaga medis

memutus mata rantai penyebaran Covid-19 terkhusus di Kabupaten Maros.

"Kami sebagai kader bersyukur bahwa Anggota DPR RI dari PKS dari Sulsel 2 memberikan perhatian penuh terhadap wilayah yang menjadi dapilnya dalam penanganan Covid-19, dan kepada pihak RS semoga ini dapat bermanfaat dan bisa membantu dalam kegiatan penanganan Covid-19," pungkasnya.

Sementara itu, dokter Fitri Adhichaya berujar, mewakili RS Salewang Maros berterima kasih atas sumbangan Andi Akmal Pasluddin.

"Insyallah bermanfaat bagi tim di rumah sakit," akunya.

Kepedulian Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin, kepada masyarakat di tengah pandemi virus Corona (Covid-19), sangat tinggi.

Buktinya, tidak hanya menyalurkan paket alat pelindung diri (APD), Andi Akmal Pasluddin juga menyiapkan takjil gratis berupa nasi kotak dilengkapi kurma selama bulan suci.

"Takjil Berkah ini gratis untuk masyarakat selama bulan Ramadhan. Dan ini disiapkan setiap hari," jelas Akmal Pasluddin

Lokasi pembagian Takjil Berkah dari Andi Akmal Pasluddin ini dipusatkan di Jalan Sudirman, depan Resto Nelayan Watampone.

"Alhamdulillah, bisa berbagi di bulan suci Ramadhan dan di tengah pandemi Covid-19. Semoga paket takjil ini bermanfaat bagi masyarakat yang menjalankan ibadah puasa," ucap anggota Fraksi PKS ini.



Anggota FPKS Salurkan Paket Sembako ke Warga Terdampak Covid-19

Pesan saya agar dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri nanti kita semua tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dan panduan ibadah sesuai maklumat MUI, untuk menekan penyebaran wabah Covid-19 di masa Lebaran

dr. H. ADANG SUDRAJAT, M.M.,Av.

Anggota Komisi IX DPR RI

Bandung (21/05) — Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung) dari Fraksi PKS, Adang Sudrajat menyalurkan ribuan paket sembako bagi warga terdampak Covid-19 di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Kamis (21/05).

Adang berharap bantuan 7.000 paket sembako ini paling tidak dapat membantu meringankan beban warga terdampak Covid-19 terlebih Hari Lebaran tinggal menghitung hari.

"Pesan saya agar dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri

nanti kita semua tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dan panduan ibadah sesuai maklumat MUI, untuk menekan penyebaran wabah Covid-19 di masa Lebaran," ucap Adang dalam sambutannya.

Menurutnya masyarakat perlu diedukasi terus menerus untuk tetap menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan covid.

"Menjaga jarak, rajin mencuci tangan dan memakai masker kalau keluar rumah bila ada keperluan mendesak,"

serunya.

Tak lupa anggota Komisi IX DPR RI ini juga memperbanyak ibadah dan doa agar wabah segera berlalu.

"Kita juga harus siap dengan normal baru yang akan mengubah cara berinteraksi sosial dan interaksi perekonomian di antara masyarakat nantinya," imbuh anggota Fraksi PKS DPR RI ini.

Namun Adang pun mengkritisi kinerja pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 ini.

"Selain peraturannya berubah-ubah terus dan tidak konsisten, apalagi sudah dibuka lagi peluang untuk lebih bebas seperti boleh mudik bersyarat, mulai dibukanya pusat-pusat keramaian, padahal kasus covid-19 belum menurun," kata Adang Sudrajat.



Bantu Warga Terdampak Covid-19, Nur Azizah Ajak Warga Shalat Ied di Rumah

Saya menyarankan shalat ledul Fitri di rumah saja karena pandemi Covid-19 ini belum hilang, khawatir jika shalat ied dilaksanakan di masjid atau lapangan, adanya kerumunan jamaah berpotensi penularan virus covid-19 dari sana. Jika hal tersebut terjadi, Naudzubillah. tentunya hal ini menjadi peluang penodaan umat Islam

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Depok (21/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, memanfaatkan bulan suci Ramadan di masa pandemi Covid-19 untuk berbagi kepada warga terdampak di Kota Depok dan Kota Bekasi, Jawa Barat.

Saat penyaluran, Anggota komisi VIII DPR RI tersebut mengajak segenap warga untuk bisa melaksanakan sholat Iedul Fitri di rumah masing-masing, untuk menghindari penyebaran wabah Covid-19.

"Saya menyarankan shalat ledul Fitri di rumah saja karena pandemi Covid-19 ini belum hilang, khawatir jika shalat ied dilaksanakan di masjid atau

lapangan, adanya kerumunan jamaah berpotensi penularan virus covid-19 dari sana. Jika hal tersebut terjadi, Naudzubillah. tentunya hal ini menjadi peluang penodaan umat Islam," pungkasnya.

Politisi perempuan PKS ini juga berharap semoga pandemi Covid-19 segera sirna dari bumi Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.

"mudah mudahan dengan Ramadhan ini seluruh masyarakat muslim sedunia berdo'a dan dikabulkan Allah swt terbebas dari pandemi Covid-19," imbuhnya.

Nur Azizah Tamhid juga

mengimbau kepada masyarakat agar mematuhi kebijakan pemerintah untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menjaga jarak (physical distancing).

"Jika tidak ada keperluan mendesak untuk tidak keluar rumah dan beribadah juga bisa dilakukan di rumah saja," pintanya.

Dalam kesempatan tersebut, Nur Azizah menyalurkan bantuan yang dilakukan di kantor sekretariat Yayasan Cahaya Keluarga Fitrah, Jalan Ratna, Jatibening, Pondokgede, kota Bekasi, Selasa, (19/5/2020)

"Pemberian bantuan sembako ini yang kami peroleh dari kementerian sosial. Sebanyak 500 paket sembako untuk didistribusikan di 2 daerah pemilihan (dapil) kota dan kota Bekasi," jelas politisi PKS yang juga istri mantan Walikota Depok 2 periode, Nur Mahmudi.

Bantuan juga diberikan kepada Terapis Anak Berkebutuhan Khusus, Guru-guru Paud, juga masyarakat terdampak Covid-19 melalui Yayasan Cahaya Keluarga Fitrah (Cagar) yang diterima secara simbolis oleh Ketua Yayasan Cagar Ustadz Deka Kurniawan.



Peduli Warga Terdampak Covid 19

Aleg PKS Distribusi Bantuan Sembako di Maluku

Wabah Covid 19 memberi dampak secara ekonomi kepada masyarakat. Saat yang sama, hari Raya Idul Fitri 1441/2020 dirayakan dengan situasi sulit. Maka, reses diprogramkan dengan mendistribusi beras dan paket sembako untuk berbagi dengan masyarakat”

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

Ambon (22/05) — Anggota DPR RI Dapil Provinsi Maluku dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, mengoptimalkan kegiatan Reses dan pelayanan jelang hari Raya Idul Fitri 1441 H.

Bentuknya, berbagi peduli dengan masyarakat di kabupaten/kota se-Maluku yang terdampak wabah covid 19. Sebanyak 20 ton beras, 5000 masker dan paket sembako lainnya disebar di sejumlah wilayah se-Maluku.

“Wabah Covid 19 memberi dampak secara ekonomi kepada masyarakat. Saat yang sama, hari Raya Idul Fitri

1441/2020 dirayakan dengan situasi sulit. Maka, reses diprogramkan dengan mendistribusi beras dan paket sembako untuk berbagi dengan masyarakat”, kata Saadiah Uluputty di Ambon (Jumat, 22 Mei 2020)

Saadiah berharap bantuan yang disalurkan menjadi bagian kontribusi untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak.

“Keterbatasan gerak karena covid 19 membuat sebagian masyarakat kesulitan mengakses sumber – sumber ekonomi. Daya beli juga

menurun”, sebut Saadiah, Anggota Fraksi PKS DPR RI.

Selain kota Ambon, bantuan disalurkan di Kabupeten Seram Bagian, Maluku Tengah dan 8 kabupaten/kota di Maluku. Jumlah bantuan yang disalurkan papar Saadiah, masih jauh dari memadai.

“Karena terbatas, maka belum menjangkau semua warga yang terdampak”, tuturnya.

Saadiah secara khusus meminta agar masyarakat di Maluku untuk menjaga kesehatan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan covid 19.

“Beberapa pekan sebelumnya, jumlah wabah covid 19 di Maluku mengalami peningkatan drastis. Namun, trend terakhir, penyebaran wabah covid melandai. Harus tetap diikhtirai dengan tetap menjalankan protocol kesehatan”, tandasnya.

Arahan pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten di Maluku harap Saadiah, dapat ditaati



dan diikuti oleh masyarakat. Sinergi ini dibutuhkan untuk memutus mata rantai wabah covid 19.

“Memaksimalkan ikhtiar dengan tetap berada di rumah, menggunakan masker jika keluar rumah dan memperbanyak doa agar wabah penyakit ini cepat berlalu”, Saadiah Uluputty menyoalrankan.

Anggota Komisi VII ini mendorong agar masyarakat antipatif terhadap pola Pemerintah yang tengah menggaungkan new normal atau pola hidup baru di tengah pandemi Covid-19.

“Protokol untuk mengatur new normal menyebabkan pola

interaksi sosial dan interaksi ekonomi juga mengalami penyesuaian. Masyarakat harus siap mengantisipasinya”, imbuhnya.

Saadiah secara khusus menyampaikan terima kasih kepada struktur DPD Partai Keadilan Sejahtera PKS Kabupaten/Kota di Maluku, kader maupun relawan yang telah membantu menyalurkan hingga ke rumah warga.

“Aktifitas distribusi perhatian yang dilakukan, sambil mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti”, tandas Saadiah menyampaikan terima kasih.

Gandeng BUMN, Rofik Distribusikan Paket Sembako & Masker Untuk Masyarakat

“Kami ingin memastikan bahwa CSR BUMN juga berperan dalam membantu mengurangi dampak serta peyebaran dari wabah virus corona, dan bantuan yang disiapkan juga harus berguna dan tepat sasaran

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

Purbalingga (17/05) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Jawa Tengah VII, Rofik Hananto, kembali mendistribusikan 1.000 Paket sembako dan 10.000 masker untuk membantu masyarakat di tengah wabah virus Corona.

Kali ini anggota Komisi VII DPR RI ini berkerjasama dengan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN dari PT Pertamina dan PGN.

“Kami ingin memastikan bahwa CSR BUMN juga berperan dalam membantu mengurangi dampak serta peyebaran dari wabah virus corona,” kata Rofik

“dan bantuan yang disiapkan juga harus berguna dan tepat sasaran” tambahnya Rofik telah membagikan

1.000 paket sembako dan 10.000 masker di 3 Kabupaten, yaitu kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.

Rofik prihatin dengan kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker, apalagi 3 Kabupaten di dapilnya masuk dalam zona merah.

“Kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker ketika keluar rumah atau berpergian ke tempat keramaian masih sangat kurang, sehingga perlu ada sosialisasi yang masif untuk meningkatkan kesadaran. Ini sangat penting dalam rangka upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona, apalagi jumlah kasus Covid-19 terus bertambah.” Kata Rofik Rofik melalui relawan

membagikan masker di tempat fasilitas umum seperti: jalan raya, pasar, masjid/ mushola serta tempat keramaian yang lainnya.

Warga sangat terbantu dengan pembagian sembako dan masker yang dilakukan. Mereka mengucapkan terima kasih.

“Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan paket sembako dan masker ini, bantuan ini sangat berarti bagi kami, apalagi di tengah kondisi yang serba sulit seperti ini” Kata Ati, Warga Kecamatan Kembangkon – Purbalingga.

Rofik mengatakan, PKS akan terus berupaya untuk membantu masyarakat dalam mengurangi dampak wabah serta mengajak semua pihak untuk terlibat.

“Kami terus berupaya mengajak semua pihak untuk terlibat dalam membantu masyarakat dalam upaya mengurangi dampak serta penyebaran virus corona.” Tegasnya

Rofik juga berharap agar wabah virus corona ini segera berakhir dan masyarakat bisa beraktivitas seperti sediakala.



Jelang Idul Fitri, Hermanto Bagikan Paket Ikan 12 Daerah Di Sumatera Barat



Padang (22/05) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, dalam perjalanan dinas ke Daerah pemilihan berkesempatan menyerahkan bantuan berupa 1900 paket ikan dan olahan ikan bantuan Pemerintah secara simbolis kepada Masyarakat di 12 kabupaten/kota di Sumatera

Barat.

Penyerahan bantuan paket ikan tersebut merupakan bentuk Kegiatan Bulan Mutu Karantina 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengambil tema: Ikan Sehat Bermutu untuk Menanggulangi Covid-19.

"Paket ikan yang dibagikan ini berasal dari jenis ikan tuna,

ikan bermutu tinggi kualitas ekspor. Ikan ini bergizi tinggi, bermanfaat untuk meningkatkan imun tubuh. Imun tubuh yang kuat bisa menangkal berbagai macam penyakit, termasuk covid-19", papar Hermanto dalam sambutannya pada penyerahan secara simbolis paket ikan tingkat Sumatera Barat di

halaman Kantor Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang, belum lama ini.

"Karena karakternya yang bergizi tinggi sekaligus bisa meningkatkan imun tubuh tersebut maka paket ikan ini cocok dikonsumsi oleh masyarakat dalam menanggulangi wabah covid-19", tambah legislator dari FPKS DPR ini.

Hermanto meminta kepada KKP agar kegiatan ini tidak hanya dilakukan tahun ini.

"Saya berharap kegiatan ini bisa dilakukan tiap tahun sebagai upaya meningkatkan gizi masyarakat terutama kalangan menengah kebawah", ucap legislator dari dapil Sumbar 1 ini.

Disamping penyerahan secara simbolis tingkat Sumatera Barat, Hermanto didampingi Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang Rudi Bambara melakukan roadshow penyerahan simbolis paket ikan di Padang Panjang, Tanah Datar, Pariaman, Padang (untuk masyarakat Padang dan Pesisir

Paket ikan yang dibagikan ini berasal dari jenis ikan tuna, ikan bermutu tinggi kualitas ekspor. Ikan ini bergizi tinggi, bermanfaat untuk meningkatkan imun tubuh. Imun tubuh yang kuat bisa menangkal berbagai macam penyakit, termasuk covid-19

**Dr. HERMANTO,
S.E., M.M**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumbar I

Selatan), Pelabuhan Muaro Padang (untuk Masyarakat Mentawai), Kabupaten Solok (untuk masyarakat Kabupaten Solok, Kota Solok dan Sawahlunto) dan Silungkang (untuk masyarakat Sawahlunto, Sijunjung dan Dharmasraya).



KH. Bukhori, Lc., M.A

Reses Virtual dan Salurkan Bantuan Beras

Kabupaten Semarang (22/05) --- Menjelang hari raya Idul Fitri 1441 H Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menyalurkan 10 ton beras, 4000 paket sembako, kiswatul ied (bingkisan lebaran) dan APD kepada masyarakat serta tenaga medis yang terdampak Covid-19 di 4 kota/kabupaten di Jawa Tengah, yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten

Kendal dan Kota Salatiga.

Penyerahan bantuan logistik secara simbolis dilaksanakan secara virtual oleh Bukhori mengingat kegiatan reses pada masa sidang ketiga 2019-2020 bertepatan dengan suasana pandemi.



Reses Virtual Saat Pandemi

Bukhori Kembali Salurkan Bantuan Beras

model reses virtual ini adalah opsi yang kami pilih dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat di tengah kondisi extraordinary ini. Selain itu, melalui tim di lapangan, kami konsisten dalam memberikan bantuan logistik secara berkala kepada masyarakat”

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Kabupaten Semarang (22/05) – Menjelang hari raya Idul Fitri 1441 H Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menyalurkan 10 ton beras, 4000 paket sembako, kiswatul ied (bingkisan lebaran) dan APD kepada masyarakat serta tenaga medis yang terdampak Covid-19 di 4 kota/kabupaten di Jawa Tengah, yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kab. Kendal dan Kota Salatiga.

Penyerahan bantuan logistik secara simbolis dilaksanakan secara virtual oleh Bukhori mengingat kegiatan reses pada masa sidang ketiga 2019-2020 bertepatan dengan

suasana pandemi.

“Reses virtual kami pilih supaya bisa memelihara komunikasi dengan konstituen kami di dapil. Sebenarnya kami sangat ingin hadir di tengah-tengah kader dan simpatisan meskipun ditengah suasana pandemi. Namun kami memilih patuh pada aturan pemerintah untuk tidak membuat kerumunan massa. Sebagai alternatif, model reses virtual ini adalah opsi yang kami pilih dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat di tengah kondisi extraordinary ini. Selain itu, melalui tim di lapangan, kami konsisten dalam memberikan bantuan

logistik secara berkala kepada masyarakat” ungkap Bukhori di Jakarta, Jumat (22/05)

Bukhori menjelaskan, bantuan berupa 5000 paket sembako yang diberikan kepada masyarakat terbagi dalam dua tahap, yakni 1.000 paket sembako sebelum Ramadhan dan 4.000 paket sembako sebelum Idul Fitri.

Selain sembako, politisi PKS dari dapil jateng 1 ini juga membagikan kiswatul ied kepada kader dan simpatisan. Bantuan didistribusikan dengan memperhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan cara disampaikan secara langsung ke penerima manfaat melalui sistem door to door.

Disinggung terkait bertambahnya jumlah pasien yang positif dan tenaga kesehatan yang wafat, Bukhori menyampaikan keprihatinannya.

Menurutnya, selain rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, kelemahan ini juga dibarengi oleh sikap pemerintah yang tidak tegas dan konsisten dalam memelihara penerapan PSBB yang efektif.



“Angka korban akan meroket jika model penanganan seperti ini terus dibiarkan. Tempat perbelanjaan seperti mall dan pasar dibiarkan tetap ramai menjelang lebaran. Ditambah, kesadaran untuk physical distancing sangat rendah sehingga wajar pada Kamis lalu terjadi peningkatan kasus secara drastis sampai menyentuh angka sekitar 900 kasus dalam sehari,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi PKS ini mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi agar ke depan laju penularan virus bisa dihindari lebih efektif supaya waktu penanganan tidak semakin bertambah. Menurutnya, pemerintah punya ambang batas waktu dan daya dalam memberikan bantuan ke masyarakat terdampak. Jika

waktu penanganannya bertambah, maka perputaran roda ekonomi semakin tertunda. Implikasinya adalah jumlah masyarakat miskin semakin meningkat.

Jika melihat data BPS 2019 penduduk miskin di Indonesia sejumlah 24,97 juta ora ng atau 9,22 persen. Melalui keterangan Menko PMK, pemerintah bahkan memprediksi jumlah masyarakat miskin akan naik menjadi 10% sampai 12%.

“Jika pemerintah tidak serius menangani wabah Covid 19, saya memprediksi kenaikan jumlah masyarakat miskin menjadi 15%. Sebab itu, Pemerintah tidak boleh menyerah dengan menghentikan narasi berdamai dengan virus. Kita adalah bangsa petarung dan pemerintah tidak boleh galau” tegas Bukhori.

Tangani Penyebaran Covid-19

Rafli Serahkan Sejumlah Masker Kepada Yayasan Lentara Muda Karya



Banda Aceh (23/05) — Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, Anggota DPR RI Asal Aceh dari Fraksi PKS, Rafli, menyerahkan bantuan masker gratis sebanyak 8.000 lembar kepada Yayasan Lentara Muda

Karya untuk disalurkan kepada masyarakat.

Penyerahan ini, kata Rafli merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam hal pencegahan penularan Covid-19, dan juga saat ini pandemi

Covid-19 sudah sangat meresahkan masyarakat dan salah satu upaya untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan Corona dengan menggunakan masker sebagaimana anjuran.

“Saya menyerahkan masker ini kepada yayasan lentara muda untuk kemudian dapat dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, semoga lentara muda karya ini dapat terus berkarya dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat sekitar” ungkapnya.

Pembina Yayasan Lentara Muda Karya, Aminullah menyampaikan bahwa masker tersebut akan dibagikan ke tempat-tempat keramaian seperti terminal, Pasar, dan juga rumah-rumah ibadah.

“Kami dari yayasan lentara muda karya juga menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada bapak Rafli yang telah menyalurkan masker sebanyak 8.000 lembar ini, semoga pembagian masker ini dapat bermanfaat bagi masyarakat” Tutupnya.

“Saya menyerahkan masker ini kepada yayasan lentara muda untuk kemudian dapat dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, semoga lentara muda karya ini dapat terus berkarya dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat sekitar”

RAFLI

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Aceh

Tetap Bertugas di Ramadhan dan Idul Fitri

Chairul Anwar Berbagi dengan Petugas Pos PSBB

“Kami mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para petugas yang terus berjaga baik di Ramadhan dan lebaran nanti untuk memastikan pengamanan di masa PSBB ini. Kami membagikan kurang lebih 50 paket sembako kepada para rekan-rekan yang sedang bertugas. Semoga rekan-rekan petugas yang berjaga diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugasnya

Drs. CHAIRUL ANWAR Apt.

Anggota Komisi VI DPR RI

Pekanbaru (23/05) — Anggota DPR RI Dapil Riau 1 dari Fraksi PKS, Chairul Anwar, memberikan bantuan paket sembako kepada para petugas Pos pengamanan PSBB yang berada di sekitar Kota Pekanbaru.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para petugas yang terus berjaga baik di

Ramadhan dan lebaran nanti untuk memastikan pengamanan di masa PSBB ini. Kami membagikan kurang lebih 50 paket sembako kepada para rekan-rekan yang sedang bertugas. Semoga rekan-rekan petugas yang berjaga diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugasnya.” ungkap Chairul (22/05/2020).

Para aparat yang bertugas di Posko Pengamanan PSBB ini

terus melaksanakan tugasnya dimasa Ramadhan dan paska lebaran nanti. Salah satu petugas yang ditemui di Pos Pengamanan Lintas Timur Bapak FH Siburuan mengatakan bahwa mereka akan terus bertugas hingga paska lebaran nanti.

“Kami disini terdiri dari gabungan petugas TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan tenaga kesehatan akan bertugas terus sampai paska lebaran. Kami bertugas mengamankan jalur Lintas Timur dan menegakkan peraturan PSBB yang berlaku. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Chairul Anwar sebagai Anggota DPR RI yang telah membeikan bantuannya, semoga ini menjadi penyemangat kami dalam bertugas,” ungkap pria yang juga menjadi anggota TNI AD ini.

Seperti yang diketahui Kepolisian Daerah (Polda) Riau menyalagakan 60 pos pengamanan yang tersebar di wilayah Provinsi Riau dan perbatasan dengan provinsi tetangga untuk mengantisipasi



adanya arus mudik Idul Fitri 2020. Proses pengamanan ini setidaknya akan berlangsung sejak 24 April hingga 31 Mei 2020 mendatang.

enanggapi hal tersebut, Chairul Anwar meminta agar masyarakat mematuhi peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah.

“Kami menghimbau agar masyarakat mematuhi semua

aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk himbauan untuk tidak mudik pada Idul Fitri saat ini, semua itu untuk kepentingan kita bersama dalam mencegah penyebaran wabah COVID-19 dan agar kita bisa kembali bisa segera beraktifitas seperti biasa,” tutup Chairul.

Bersama BUMN di Sumatera Barat

Nevi Zuairina Bagikan APD ke 5 Rumah Sakit

TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme / Marxisme adalah sumber penting Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Karena lahirnya RUU HIP adalah adanya pemikiran perlunya penegasan Pancasila sebagai soko guru ideologi bangsa

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi pks DPR RI dari Sumbar II

Padang (16/05) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, Jumat (15/05/2020) menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Kesehatan (Alkes) ke 5 rumah sakit di Sumatera Barat.

Rumah sakit yang mendapat hantaran APD oleh Anggota Dewan ini antara lain RSUD Achmad Mochtar Kota Bukittinggi, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Bukittinggi, RSUD Pariaman, RSUD Padang Pariaman dan RSUD Pasaman.

Bantuan yang diberikan bersama Kementerian BUMN itu diserahkan melalui Satgas

BUMN bekerjasama dengan BUMN-BUMN di kabupaten tempat lokasi Rumah Sakit.

Selain Rumah sakit, bantuan APD juga di serahkan pada simpul-simpul masyarakat yang di terima tokoh di tiap-tiap daerah.

"Ada beberapa dus APD dan Alkes, yang merupakan kepedulian BUMN terhadap petugas kesehatan itu sendiri. Semoga, bantuan ini mampu meringankan beban yang berat RSUD soal kekurangan APD," kata politisi PKS yang juga Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Barat tersebut.

Nevi menjelaskan, setiap

rumah sakit mendapat APD set, APD Disposable, Masker Medik dan Sepatu Medik. Mengenai jumlah disesuaikan dengan asumsi kebutuhan. 10 unit hingga 250 unit tiap item tergantung jenis APD.

Sedangkan untuk jenis APD di masyarakat, lanjutnya, jenis APD nya adalah Masker Kain, Paket Wastafel, Hand Sanitizer, Pompa Disinfektan dan Disinfektan. jumlah juga tergantung jenis APD dan asumsi kebutuhan wilayah antara 10 unit hingga 20 ribu unit.

"Terima kasih kepada BUMN yang telah bekerja sama dengan anggota-anggota DPR di seluruh Indonesia untuk berkontribusi menangani wabah Covid-19. Perwakilan BUMN pada penyerahan APD di Bukittinggi diwakili PT Perum Bulog. Sedangkan di Pariaman di wakili PT. PLN. Semoga masyarakat dan rumah sakit merasakan bantuan ini", tutup Nevi Zuairina.

Koordinator Satgas BUMN PLN Pariaman Bayu Satria menyampaikan terima kasih banyak kepada anggota dewan



pusat yang telah ikut menangani kekurangan APD ini. "Satgas BUMN ini terbentuk atas dorongan DPR RI, terkhusus perjuangan Ibu Nevi Zuairina," kata Bayu dari PLN Pariaman ini.

Menurut Bayu, bantuan ini adalah energi antara DPR RI dengan BUMN, dalam melihat arti penting penanganan virus corona. RSUD Tentunya menjadi garda terdepan dalam membendung dan memutus

mata rantai covid-19 ini.

Nevi menyebutkan, berdasarkan informasi dari Dirut RSUD Indria, APD dan Alkes ini masih kurang di lingkungan rumah sakit yang terletak di Kampung Baru ini.

"Kita berharap, Ibu Nevi terus berjuang dalam hal ini. Sebab, BUMN memang mitra kerjanya Komisi VI DPR RI, sehingga kekurangan hal itu bisa diatasi dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Bayu.

Berbagi Sembako bersama Mitra

Netty Ajak Masyarakat Maknai Momen Kebangkitan Nasional

Saya mengajak masyarakat berperan aktif menggalang solidaritas sosial. Jika pemerintah lambat dan plin-plan dalam mengambil sikap, maka masyarakat jangan bersikap masa bodoh dan terserah

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Cirebon (20/05) — Jelang lebaran ini, banyak masyarakat terdampak Covid-19 mengalami kesulitan hidup. Untuk mengurangi beban mereka, Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetyani, menggandeng mitra Komisi IX menyalurkan paket sembako bagi masyarakat di Kokab Cirebon dan Indramayu.

"Dengan dukungan mitra komisi IX DPR RI, kami menyalurkan 7.000 paket sembako bagi pekerja bukan penerima upah seperti driver ojol, pedagang keliling, petani, nelayan dan pekerja lepasan. Juga untuk masyarakat tidak mampu semisal perempuan kepala keluarga, yatim dan fakir miskin. Ini tentunya tidak dapat

memenuhi kebutuhan semua warga yang membutuhkan. Seperti menaburi lautan dengan garam. Namun, inilah bentuk kepedulian kami guna meringankan beban masyarakat," ungkap Netty dalam rilis yang diterima oleh media pada Rabu (20/05).

Secara simbolis, penyerahan bantuan dihadiri oleh pimpinan BPJS Kesehatan kantor Cirebon, pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cirebon dan perwakilan DPRD Kota dan kabupaten.

Netty, legislator dapil Cirebon dan Indramayu ini berpesan untuk saling bersinergi antara Anggota Komisi IX dan mitranya dalam bingkai memberikan pelayanan dan advokasi kepada

masyarakat.

"Tujuannya adalah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19. Terlebih jelang lebaran, saat kebutuhan pangan meningkat namun daya beli masyarakat menurun drastis," ujarnya.

Selain, melakukan distribusi paket sembako bersama mitra, politisi PKS ini sejak Covid-19 melanda, telah secara simultan mendistribusikan bantuan alat dan bahan medis bagi rumah sakit dan puskesmas serta bantuan pangan bagi masyarakat.

"Saat masa awal pandemi ini kami sudah dibagikan berbagai paket APD, masker medis, masker N-95, hand sanitizer, dan multivitamin bagi tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit. Selain itu, 10 ton lebih beras sudah terdistribusi kepada masyarakat sebagai stimulus kebutuhan sehari-hari. Melihat tren penurunan kasus baru belum terlihat dan PSBB yang masih berlaku, masyarakat akan tetap terdampak secara ekonomi," tandasnya.



Tokoh Jawa Barat ini berharap masyarakat Indonesia, khususnya Cirebon-Indramayu, terus menggalang semangat persaudaraan dan kesetiakawanan sosial guna memaknai spirit kebangkitan nasional.

"Cirebon dan Indramayu sebagai salah satu lumbung padi Jawa Barat jangan sampai ada warga yang meninggal karena kelaparan. Ironis sekali jika sampai terjadi. Saya mengajak masyarakat berperan aktif menggalang solidaritas sosial. Jika pemerintah lambat dan

plin-plan dalam mengambil sikap, maka masyarakat jangan bersikap masa bodoh dan terserah. Kita tolak gerakan Indonesia Terserah. Ayo, bahu membahu melawan Covid-19," tegasnya.

Netty mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan "Ayo menanam" yang digagas PKS.

"Kita awali ketahanan pangan dan swasembada dari rumah kita sendiri. Mulai dari menanam sayuran untuk kebutuhan di rumah," tutup Netty.

Idul Fitri kembali suci;

*Hari Aspirasi penuh kehangatan silaturahmi
Hari Santri Dikumandangkan Takbir
Hari Proklamasi Kemerdekaan
dari Belunggu Godaan Syaithan.
Hari Mosi Integral niat dan aplikasi Ibadah*

Selamat
Idul Fitri
Hari Kemenangan 1 Syawal 1441 H

قَبْلَ اللَّهِ مَنَاوَمِنْكُمْ كَلَامُكُمْ وَأَنْتُمْ خَيْرٌ

PROFIL

H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.



KELUARGA

Pondasi Sosial Pertama & Utama

Jelang idul fitri mari kita sucikan diri. Bersimpuh kepada Allah agar bisa berjumpa dengan Ramadhan kembali.

Pekan ini kita akan bersilaturahmi dalam program #KeluargaPKS dengan Anggota Fraksi PKS DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) II yaitu Suryadi Jaya Purnama, S.T atau lebih dikenal dengan SJP. Lahir di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 25 Februari 1974 saat ini berusia 46 tahun.

Karier politik SJP terbilang terbilang moncer di usianya yang masih muda, namun pengalamannya cukup banyak. Sejak terjun ke dunia politik

berhasil terpilih sebagai anggota DPRD NTB periode 2004-2009 dan di periode 2009-2014 terpilih kembali dan langsung menempati posisi pimpinan sebagai Wakil Ketua DPRD NTB. Kini sebagai Anggota DPR RI diamanahkan di Komisi V yang membidangi infrastruktur, perhubungan dan desa.

SJP menikah dengan Nuryanti Tadjuddin SE.ME dan dikarunia putra 5 dan putri. Masing-masing namanya dari yang tertua adalah Muhammad Wali Hajid, Nurani Syahidah, Muhammad Wali Abid, Muhammad Fatih Gemilang dan Muhammad Pakar Hanif. Keharmonisan dan komunikasi

keluarga menjadi kunci penting ditengah kesibukan SJP.

Pesan Suryadi Jaya Purnama untuk keluarga Indonesia "Apapun yang ingin kita bangun, mulailah dari membangun keluarga, karena keluarga adalah pondasi sosial yg pertama dan paling utama.

SOCIAL MEDIA

Untuk mengetahui sepak terjang Suryadi Jaya Purnama, ST dapat mengikuti social media:

Facebook : Suryadi JP
Twitter : @suryadijepe
Instagram : suryadijp



Apapun yang ingin kita bangun, mulailah dari membangun keluarga, karena keluarga adalah pondasi sosial yg pertama dan paling utama





Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

**KANAL RESMI
FRAKSI PKS
DPR RI**

fraksi.pks.id



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI